



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Laporan Kinerja Tahun 2018



*Terwujudnya Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah  
Sesuai SNP yang bertamadun Melayu*

**Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kepulauan Riau**

Tel -  
Fax -

Jalan Tata Bumi Km. 20 Ceruk Ijuk  
Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau  
Kode Pos 28125

lpmpkepri.kemdikbud.go.id  
lpmp.kepri@kemdikbud.go.id



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya LPMP Kepulauan Riau berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2018 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja LPMP Kepulauan Riau tahun 2018.

LPMP Kepulauan Riau pada tahun 2018 menetapkan 2 sasaran dan 14 indikator kinerja. Secara umum LPMP Kepulauan Riau telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya data jumlah sekolah yang terdapat di dalam aplikasi PMP maupun Dapodik belum valid. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LPMP Kepulauan Riau pada tahun 2018. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja LPMP Kepulauan Riau pada tahun 2018.

Bintan, Januari 2019  
Kepala LPMP Kepulauan Riau

Drs. Irwan Safii, M.Pd.  
NIP196512311992031014

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	2
D. Permasalahan Utama yang dihadapi LPMP Kepulauan Riau	3
E. Isu Strategis Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
A. Visi dan Misi	4
B. Tujuan Strategis	4
C. Ringkasan Perjanjian Kinerja LPMP Kepulauan Riau	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	6
A. Capaian Kinerja	6
B. Realisasi Anggaran	36
C. Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN	40
PERJANJIAN KINERJA	41
PENGUKURAN KINERJA	45
<i>Output dan Outcome</i> Indikator Kinerja 2018	48

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja LPMP Kepulauan Riau tahun 2018 menyajikan tingkat pencapaian 2 sasaran dengan 14 indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018. Uraian tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum, capaian kerjanya adalah sebagai berikut.

### IKK1 SD yang telah dipetakan mutunya



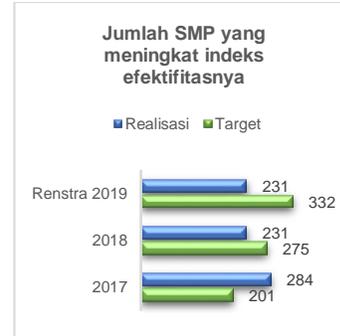
### IKK2 SD yang meningkat indeks efektifitasnya



### IKK3 SMP yang telah dipetakan mutunya



### IKK4 SMP yang meningkat indeks efektifitasnya



### IKK5 SMA yang telah dipetakan mutunya



### IKK6 SMA yang meningkat indeks efektifitasnya



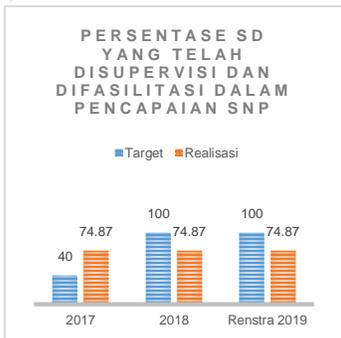
## IKK7 SMK yang telah dipetakan mutunya



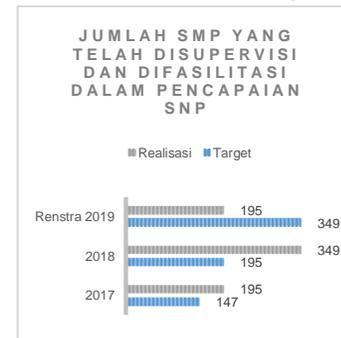
## IKK8 SMK yang meningkat indeks efektifitasnya



## IKK9 SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP



## IKK10 SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP



## IKK11 SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP



## IKK12 SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP



Capaian daya serap LPMP Kepulauan Riau Januari s.d. Desember 2018 adalah:



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Terdapat beberapa sekolah model yang merger, sehingga LPMP Kepulauan Riau harus segera menggantikan sekolah tersebut dengan sekolah baru. Hal ini disebabkan karena sekolah yang merger tersebut bergabung dengan sekolah rujukan.
2. Terdapat beberapa satuan pendidikan yang ditunjuk sebagai sasaran sekolah model tahun 2016 dan 2017 sehingga terjadi kekurangan sekolah model.
3. Terdapat sekolah yang mengundurkan diri sebagai sekolah model, sehingga mengurangi sasaran.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Penggantian sekolah model untuk memenuhi kuota 154 sekolah;
2. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi terkait usulan sekolah model tahun 2018.



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Gambaran Umum

### LPMP Kepulauan Riau

terbentuk tidak lepas dari implikasi pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

1 Juli 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73125/A4.4/KP/2013 melantik Dr. Ulfa Maria, M.Pd. sebagai Kepala LPMP Kepulauan Riau

Sejak 1 Februari 2018 dipimpin oleh Drs. Irwan Safii, M.Pd.

Dengan wilayah kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di 7 Kabupaten/Kota

Yang didukung dengan sejumlah SDM sebagai berikut:



## B. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara;

## C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

### Tugas

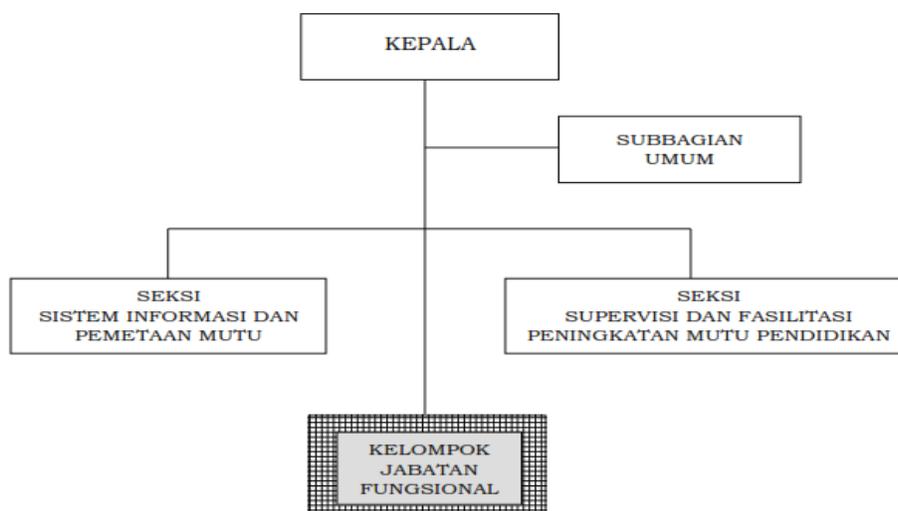
melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

### Fungsi

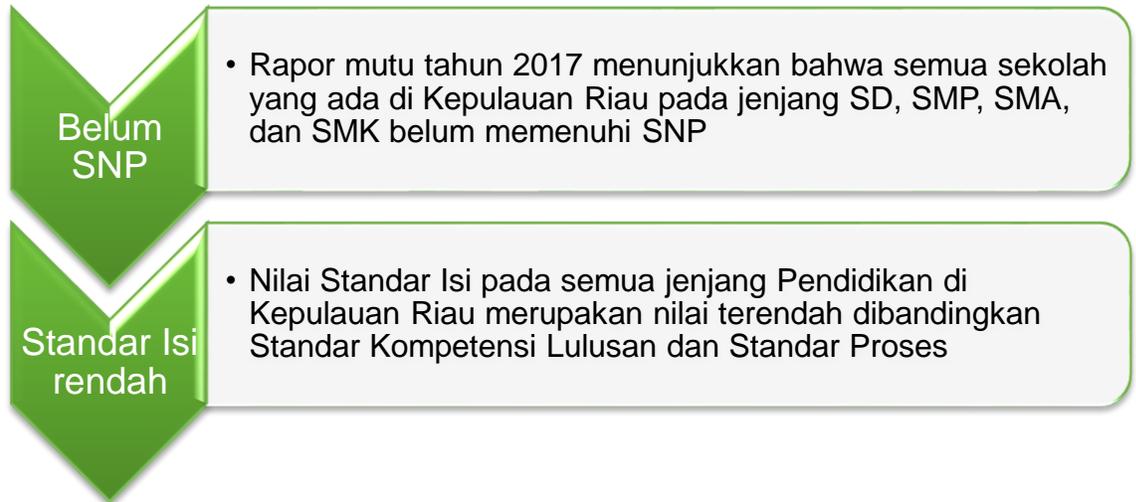
- Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
- Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

### Struktur Organisasi LPMP Kepulauan Riau

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017)



**D. Permasalahan Utama yang dihadapi LPMP Kepulauan Riau**



**E. Isu Strategis Organisasi**

**SDM**

Jumlah SDM di LPMP Kepulauan Riau yang terbatas menyulitkan dalam pelaksanaan kegiatan secara serentak di 7 Kabupaten/Kota

**Implementasi SPMI**

Keberagaman pemahaman implementasi SPMI oleh Fasilitator dan Sekolah Model/Imbas

**Akses Internet**

Sekolah-sekolah yang berada di luar jangkauan internet sulit melakukan pengisian aplikasi PMP

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Visi dan Misi

#### Visi

- Terwujudnya Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai SNP yang Bertamadun Melayu di Kepulauan Riau

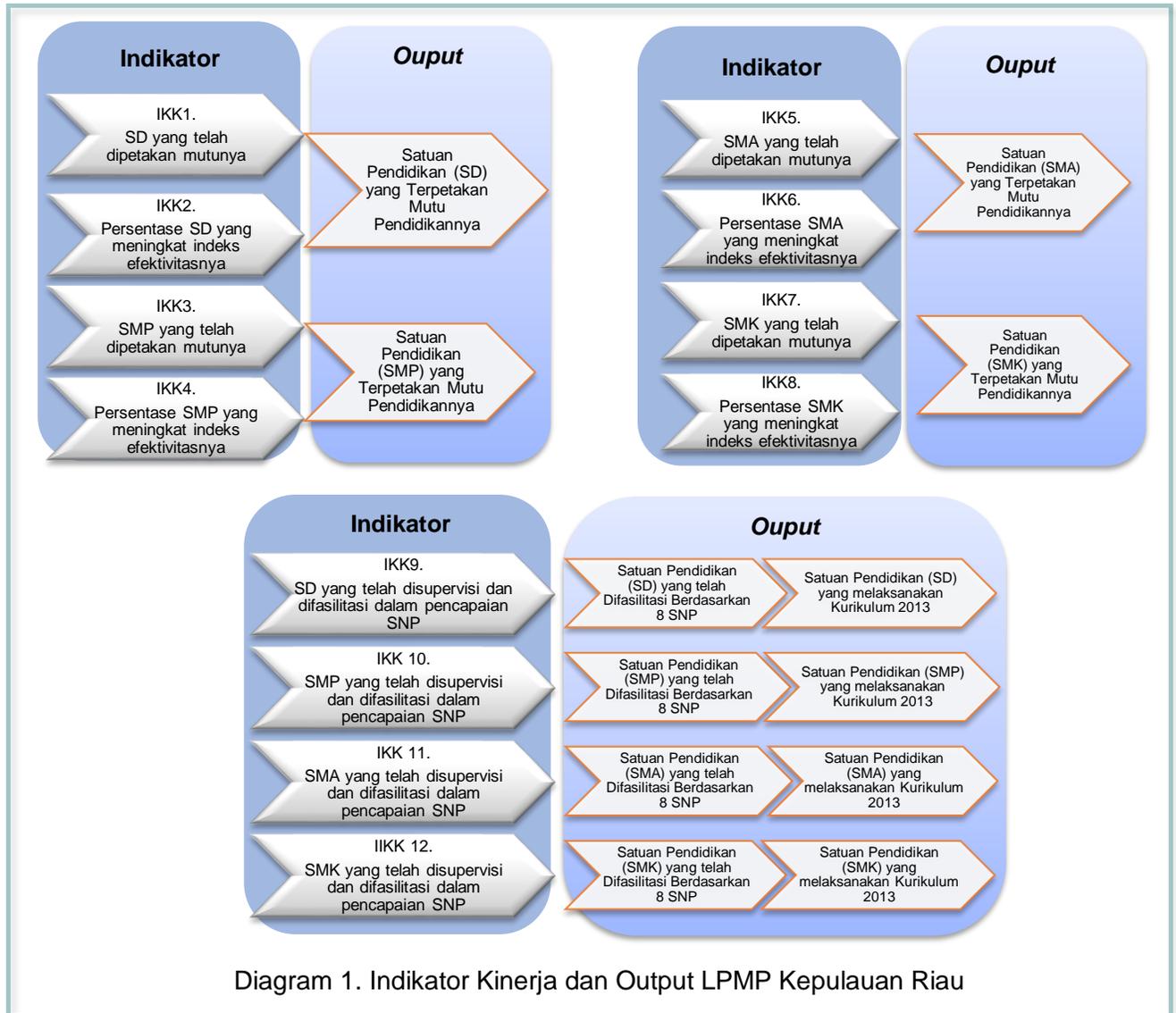
#### Misi

- Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar sesuai SNP (M1);
- Meningkatkan Layanan Pendidikan Menengah sesuai SNP (M2);
- Meningkatkan Tata Kelola LPMP yang Transparan, Akuntabel, dan Pelibatan Publik (M3).

### B. Tujuan Strategis

Kode	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019
TS1	Meningkatnya mutu satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kepulauan Riau	Satuan pendidikan yang mempertahankan dan meningkat kategori SNPnya	80%
TS2	Meningkatnya sistem tata kelola LPMP Kepulauan Riau	Skor SAKIP	80

C. Ringkasan Perjanjian Kinerja LPMP Kepulauan Riau



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja

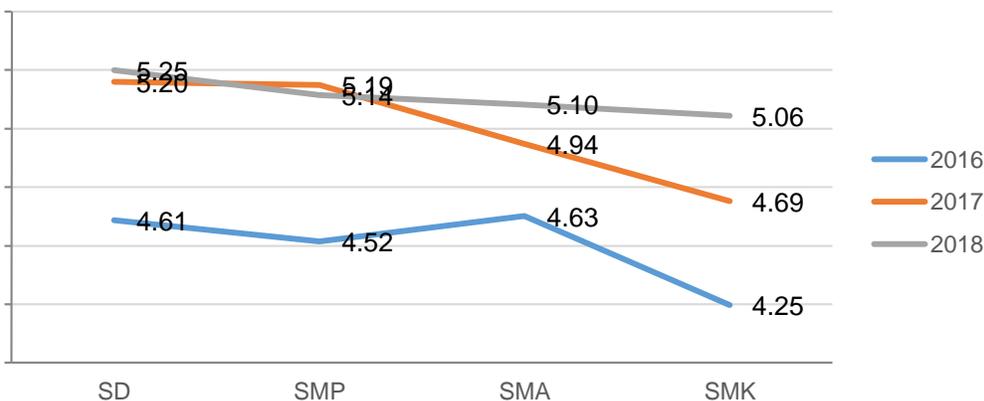
Sesuai perjanjian kinerja tahun 2018, LPMP Kepulauan Riau menetapkan 2 sasaran dengan 14 indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2018.

Catatan:

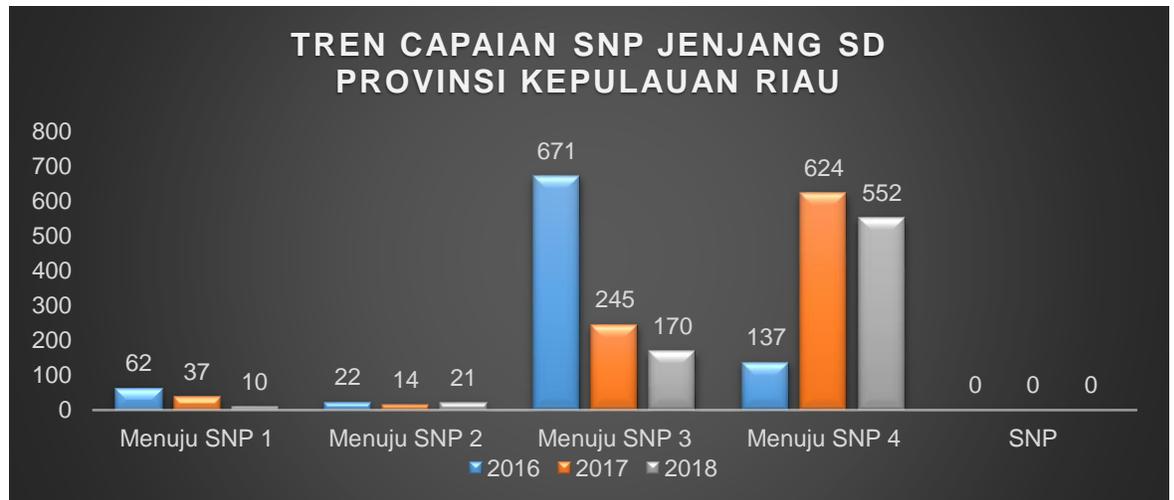
Jumlah sekolah yang telah dipetakan mutunya yang tercantum pada LAKIP LPMP Kepulauan Riau tahun 2017 merupakan data yang didapatkan dari aplikasi PMP pada pertengahan Desember 2017. Di mana pada saat itu belum semua data yang sudah terkirim oleh satuan pendidikan yang ada di Kepulauan Riau diterima oleh server Pusat. Oleh karena itu, LPMP melakukan perhitungan ulang terhadap capaian kinerja tahun 2017 untuk indikator kinerja SD, SMP, SMA, dan SMK yang telah dipetakan mutunya. Selain itu, setelah mendapatkan arahan yang mendalam dari tim Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, LPMP Kepulauan Riau juga melakukan perhitungan ulang untuk SD, SMP, SMA, dan SMK yang meningkat indeks efektivitasnya. Sebelumnya data peningkatan indeks efektivitas yang ditampilkan pada LAKIP 2017 adalah indeks efektivitas hasil perhitungan secara global pada setiap jenjangnya. Sedangkan pada LAKIP 2018, indeks efektivitas yang ditampilkan adalah hasil perhitungan berdasarkan data per sekolah per jenjang.

## Sasaran #1 Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan

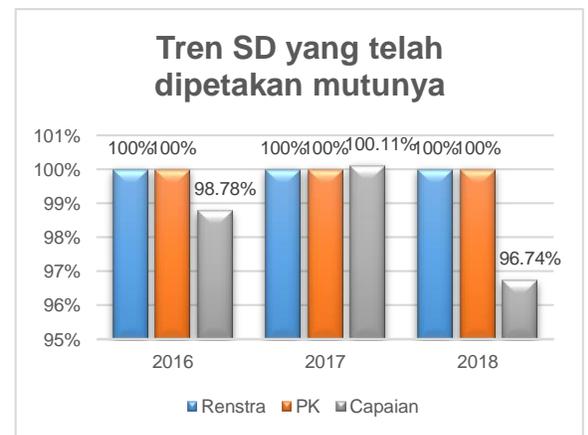
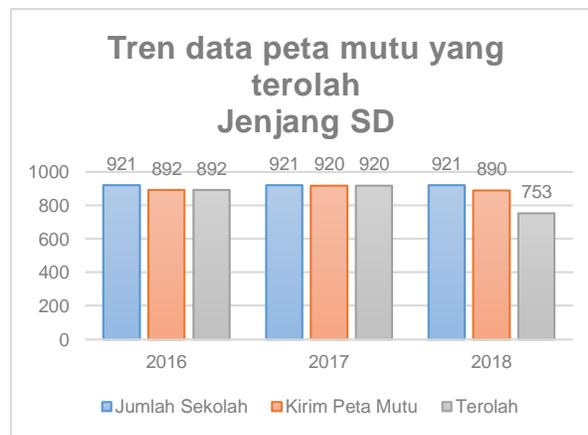
TREN CAPAIAN SNP PER JENJANG



IKK 1. SD yang telah dipetakan mutunya



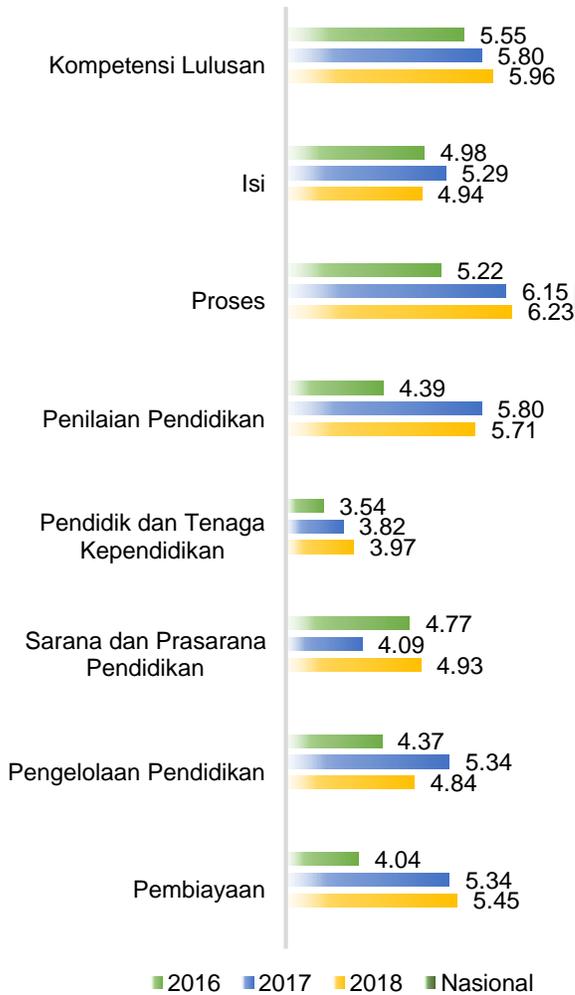
Realisasi 2017	2018			Target Renstra 2019	Capaian terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	Capaian		
100,11%	100%	96,74%	96,74%	100%	96,74%



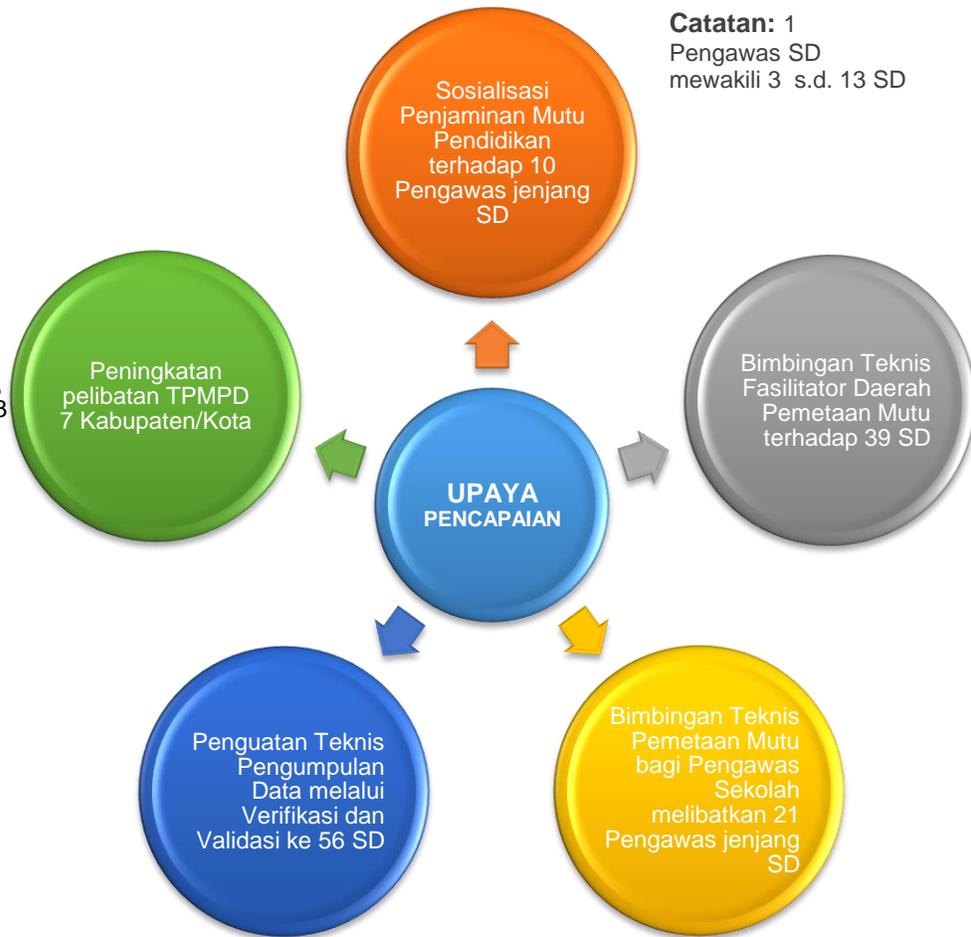
Informasi - Keterangan Kategori Capaian

Status	Kategori	Status Bawah	Status Atas
★	Menuju SNP 1	0	2,04
★★	Menuju SNP 2	2,05	3,70
★★★	Menuju SNP 3	3,71	5,06
★★★★	Menuju SNP 4	5,07	6,66
★★★★★	Sudah SNP	6,67	7,00

**PETA CAPAIAN SNP  
JENJANG SD**



Data Nasional tidak dapat ditampilkan karena belum dihasilkan



Catatan: 1  
Pengawas SD mewakili 3 s.d. 13 SD

**Outcome dari IKK 1. SD yang telah dipetakan mutunya:**  
890 SD yang meningkat mutu pendidikannya  
**Penyerapan Anggaran:**  
Rp. 1.291.591.359, (95,34% dari Rp. 2.184.696.000)

**KENDALA/PERMASALAHAN PEMETAAN MUTU JENJANG SD**

- Sekolah yang terdapat dalam Dapodik tidak *update* (sekolah yang sudah tidak beroperasi dan sekolah baru belum memiliki SNP masih/sudah terinput di/ke dalam Dapodik)
- Belum semua data peta mutu yang terkirim dapat diolah data mutunya
- Belum ada SD berkategori SNP
- Terdapat 10 SD dengan kategori Menuju SNP 1 dan 21 SD berkategori Menuju SNP 2

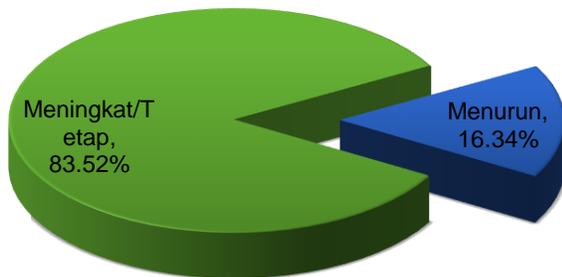
**LANGKAH ANTISIPASI DI MASA DEPAN**

- Meningkatkan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota untuk memastikan sekolah yang ada di dalam Dapodik merupakan sekolah yang masih beroperasi
- Mendorong penyempurnaan aplikasi PMP
- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk peningkatan mutu kategori

IKK 2. SD yang meningkat indeks efektifitasnya

Realisasi 2017	2018			Target Renstra 2019	Capaian terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	Capaian		
87,33%	75%	83,52%	111,36%	95%	87,92%

Persentase SD yang Meningkatkan Rapor Mutunya Tahun 2018



Supervisi dan Fasilitasi pencapaian 8 SNP kepada 293 SD



Supervisi K13 terhadap 236 SD



Pengembangan Sekolah Model di 57 SD



Asistensi PPK terhadap 57 SD



Supervisi Sekolah Piloting PPK ke 9 SD



## Analisis:

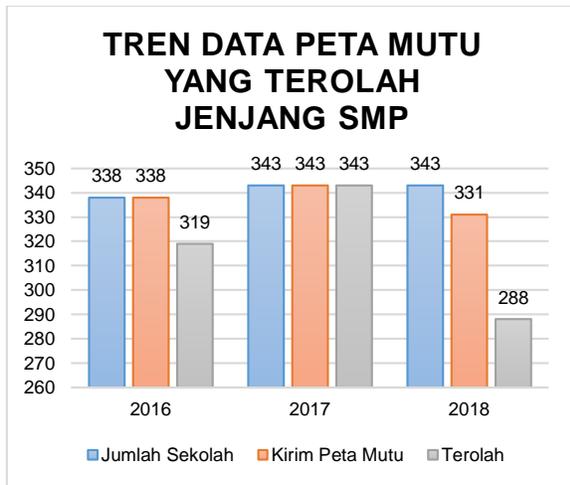
Tidak tercapainya target peningkatan rapor mutu SD tahun 2018 diduga disebabkan oleh karena peningkatan kesadaran sekolah untuk mengisi instrument PMP sesuai dengan kondisi di lapangan. Pendampingan pemetaan mutu pendidikan oleh LPMP dan pengawas, serta dengan pemberian pemahaman tentang pentingnya akurasi rapor mutu terhadap penyusunan arah kebijakan dan inovasi peningkatan mutu pendidikan diduga berkontribusi terhadap penurunan angka rapor mutu. Dengan demikian validasi data rapor mutu pendidikan jenjang SD lebih baik. Provinsi Kepulauan Riau dengan geografisnya yang kepulauan yang mana banyak sekolah yang tidak terjangkau jaringan internet. Hal ini menyebabkan pihak sekolah terkendala untuk melakukan pengiriman peta mutu sekolah. Sekolah harus melakukan perjalanan laut terlebih dahulu untuk mendapatkan koneksi internet. Yang sering kali perjalanan laut ini tergantung cuaca. Berikut contoh beberapa sekolah yang belum mengirimkan peta mutu dan terletak pada daerah terluar provinsi Kepulauan Riau.

The screenshot shows the 'Progres Kirim Data' page of the 'Penjaminan Mutu Pendidikan' system. The table displays the following data:

No	Nama Sekolah	NPSN	Bentuk	Status	Kirim Terakhir	Status Kirim	Jml Kirim	Jml Responen	Validasi
22	SD NEGERI 022 SENAYANG	11001488	SD	Negeri	-	Belum Kirim	0	0	🚫
23	SD NEGERI 023 SENAYANG	11001491	SD	Negeri	2018-08-20 19:01:02.960	Sudah Terproses	1	27	✅
24	SD NEGERI 024 SENAYANG	11001494	SD	Negeri	-	Belum Kirim	0	0	🚫
25	SD NEGERI 025 SENAYANG	11001496	SD	Negeri	2018-09-01 09:03:09.230	Sudah Terproses	2	26	✅
26	SD NEGERI 026 SENAYANG	11002614	SD	Negeri	2018-08-22 21:48:42.630	Sudah Terproses	2	32	✅
27	SD NEGERI 027 SENAYANG	11002595	SD	Negeri	2018-08-26 17:15:48.827	Sudah Terproses	2	27	✅
28	SD NEGERI 028 SENAYANG	11002596	SD	Negeri	2018-09-07 20:23:51.393	Sudah Terproses	3	31	🚫
29	SD NEGERI 029 SENAYANG	11002799	SD	Negeri	2018-08-26 09:20:46.500	Sudah Terkirim	2	40	✅
30	SD NEGERI 030 SENAYANG	11002801	SD	Negeri	2018-08-11 01:29:16.583	Sudah Terproses	2	21	✅
31	SD NEGERI 031 SENAYANG	11002802	SD	Negeri	2018-09-01 07:18:31.123	Sudah Terproses	10	26	✅
32	SD NEGERI 032 SENAYANG	11002803	SD	Negeri	2018-08-27 00:08:21.570	Sudah Terproses	3	13	✅
33	SD NEGERI 033 SENAYANG	11002804	SD	Negeri	-	Belum Kirim	0	0	🚫
34	SD NEGERI 034 SENAYANG	11002805	SD	Negeri	2018-08-29 02:54:20.637	Sudah Terkirim	2	21	✅
35	SD NEGERI 035 SENAYANG	11002806	SD	Negeri	-	Belum Kirim	0	0	🚫
36	SD NEGERI 036 SENAYANG	11002807	SD	Negeri	2018-08-28 21:42:31.940	Sudah Terproses	1	25	🚫
37	SD NEGERI 037 SENAYANG	60730368	SD	Negeri	-	Belum Kirim	0	0	🚫
38	SD NEGERI 038 SENAYANG	60730369	SD	Negeri	2018-08-15 17:25:48.577	Sudah Terproses	3	32	🚫

IKK 3. SMP yang telah dipetakan mutunya

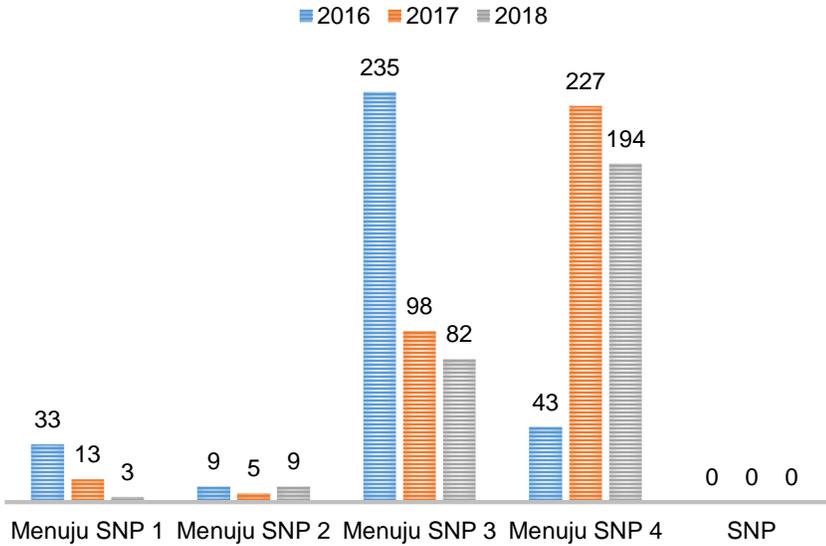
Realisasi 2017	2018			Target Renstra 2019	Capaian terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	Capaian		
102.39%	100%	96,22%	96,22%	100%	96,22%



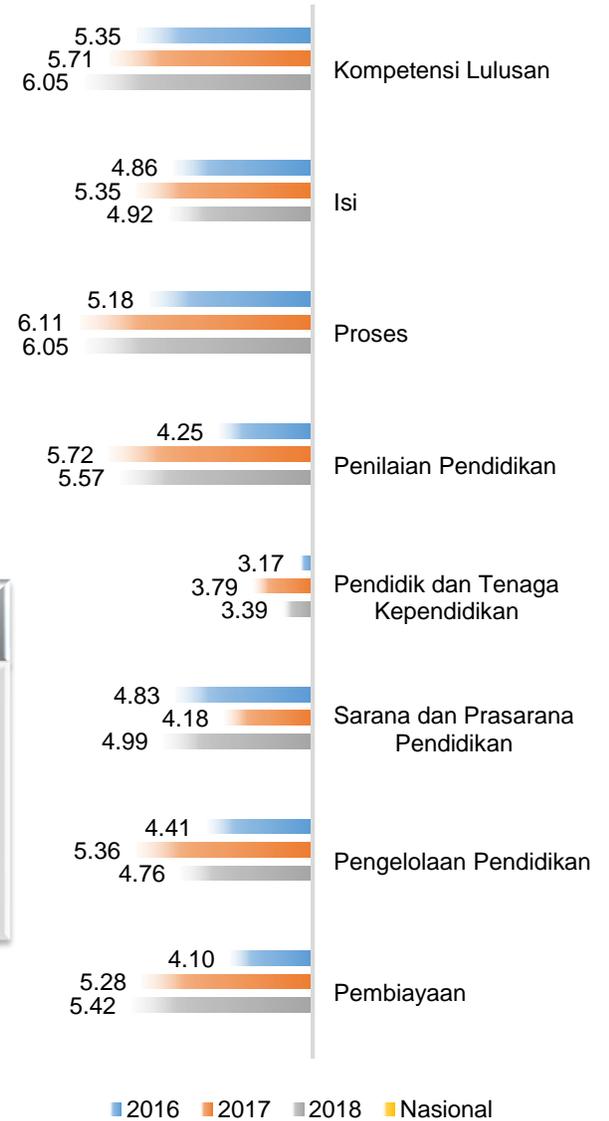
Informasi - Keterangan Kategori Capaian

Status	Kategori	Status Bawah	Status Atas
★	Menuju SNP 1	0	2,04
★★	Menuju SNP 2	2,05	3,70
★★★	Menuju SNP 3	3,71	5,06
★★★★	Menuju SNP 4	5,07	6,66
★★★★★	Sudah SNP	6,67	7,00

TREN CAPAIAN SNP JENJANG SMP



PETA CAPAIAN SNP JENJANG SMP TAHUN 2016 S.D. 2018



**KENDALA/PERMASALAHAN PEMETAAN MUTU JENJANG SD, SMP, SMA, dan SMK**

- Sekolah yang terdapat dalam Dapodik tidak *update* (sekolah yang sudah tidak beroperasi dan sekolah baru belum memiliki SNP masih/sudah terinput di/ke dalam Dapodik)
- Belum semua data peta mutu yang terkirim dapat diolah data mutunya
- Belum ada SMP berkategori SNP
- Terdapat 3 SD dengan kategori Menuju SNP 1 dan 9 SD berkategori Menuju SNP 2

**LANGKAH ANTISIPASI DI MASA DEPAN**

- Meningkatkan koordinasi dengan dinas provinsi/kabupaten/kota untuk memastikan sekolah yang ada di dalam Dapodik merupakan sekolah yang masih beroperasi
- Mengupayakan penyempurnaan aplikasi PMP
- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk peningkatan mutu kategori

Data Nasional tidak dapat ditampilkan karena belum dihasilkan

Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan terhadap 7 Pengawas jenjang SMP

Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Pemetaan Mutu terhadap 22 SMP

Bimbingan Teknis Pemetaan Mutu bagi Pengawas Sekolah melibatkan 14 Pengawas jenjang SMP

Penguatan Teknis Pengumpulan Data melalui Verifikasi dan Validasi ke 3 SMP



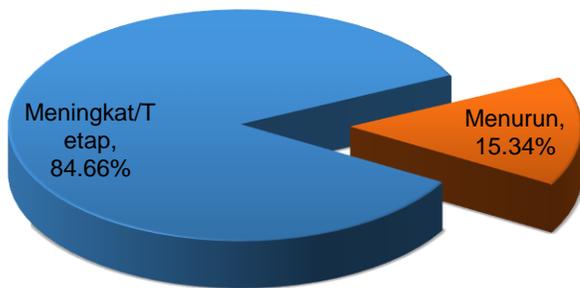
Catatan: 1 Pengawas SMP mewakili 8 s.d. 24 SMP

**Outcome dari IKK 3. SMP yang telah dipetakan mutunya: 331 SMP yang meningkat mutu pendidikannya**  
**Penyerapan Anggaran: Rp. 479.138.730, (95,34% dari Rp. 2.184.696.000)**

IKK 4. SMP yang meningkat indeks efektifitasnya

Realisasi 2017	2018			Target Renstra 2019	Capaian terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	Capaian		
88,75%	80%	84,66%	105,83%	95%	89,12%

Persentase SMP yang Meningkatkan Rapor Mutunya Tahun 2018

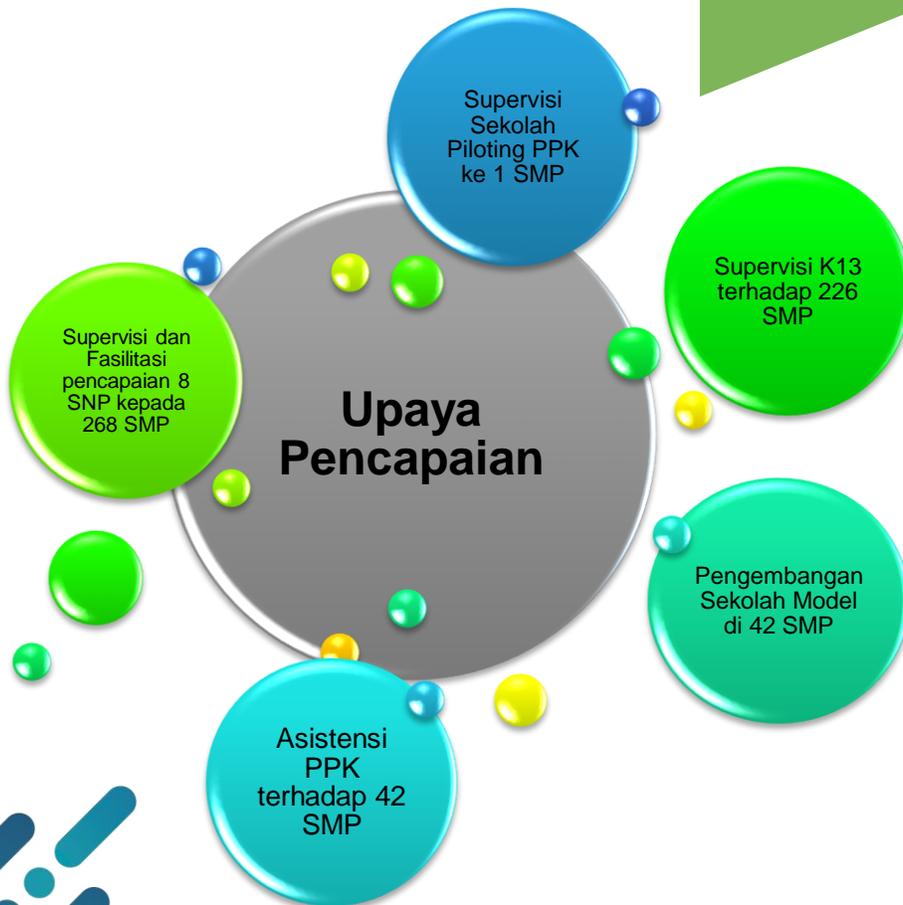


**Permasalahan**

- Rapor mutu tahun 2018 belum semuanya diolah/dihasilkan (70 SMP belum terolah)
- Signal internet tidak memadai

**Langkah Antisipasi**

- Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada Pengawas, Kepala Sekolah, dan Operator melalui Monitoring dan Evaluasi



## Analisis:

Tidak tercapainya target peningkatan rapor mutu SMP tahun 2018 diduga disebabkan oleh karena peningkatan kesadaran sekolah untuk mengisi instrument PMP sesuai dengan kondisi di lapangan. Pendampingan pemetaan mutu pendidikan oleh LPMP dan pengawas, serta dengan pemberian pemahaman tentang pentingnya akurasi rapor mutu terhadap penyusunan arah kebijakan dan inovasi peningkatan mutu pendidikan diduga berkontribusi terhadap penurunan angka rapor mutu. Dengan demikian validasi data rapor mutu pendidikan jenjang SMP lebih baik.

Aplikasi PMP selama masa penginputan melakukan beberapa kali rilis pembaruan. Operator sekolah yang berada di Kepulauan dengan jaringan internet yang tidak bagus kesulitan melakukan pembaruan karena ukuran *file* pembaruan yang cukup besar. Sehingga Operator menyiasati dengan menggunakan aplikasi dari pihak ketiga agar penginputan peta mutu sekolah dapat tetap dilaksanakan. Hal ini menyebabkan data peta mutu yang sudah terkirim tidak dapat diolah. Sehingga rapor mutu harus dikirimkan ulang dan pada akhirnya menyebabkan rapor mutu yang dihasilkan belum 100% sampai saat ini. Berikut contoh beberapa sekolah yang teridentifikasi menggunakan aplikasi tidak resmi PMP bukan dari Kemendikbud.

**Progres Kirim Data**  
Menampilkan progres pengiriman data berdasarkan wilayah

Pengiriman Data PMP Tahun 2018

Jenjang: **Semua** | Bentuk: **Semua** | Tahun: **2018**

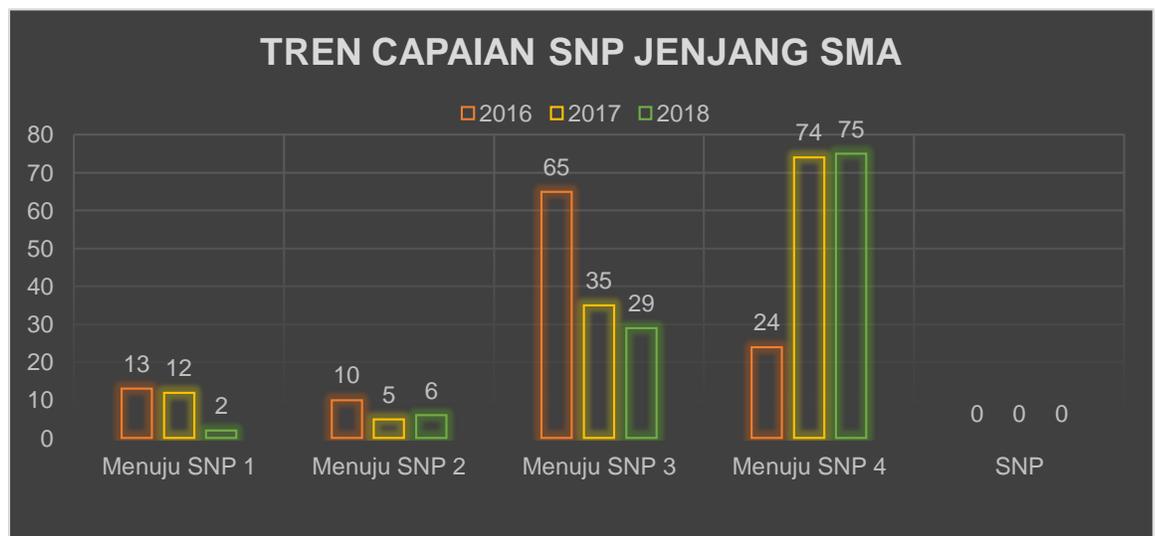
Pencarian:

No	Nama Sekolah	NPSN	Bentuk	Status	Kirim Terakhir	Status Kirim	Jml Kirim	Jml Responden	Validasi
40	SMP NEGERI 1 SENAYANG	11001520	SMP	Negeri	2018-08-30 17:50:33.353	Sudah Terproses	1	26	✓
41	SMP NEGERI 10 SENAYANG	11002608	SMP	Negeri	2018-10-06 06:23:59.657	Sudah Terproses	2	21	✗
42	SMP NEGERI 11 SENAYANG	11002610	SMP	Negeri	2018-08-20 23:48:04.787	Sudah Terproses	1	22	✗
43	SMP NEGERI 12 SENAYANG	11002611	SMP	Negeri	2018-08-30 16:15:13.947	Sudah Terproses	2	22	✓
44	SMP NEGERI 2 SENAYANG	11001525	SMP	Negeri	2018-08-23 00:31:21.197	Sudah Terproses	1	26	✓
45	SMP NEGERI 3 SENAYANG	11001528	SMP	Negeri	2018-08-29 23:04:57.680	Sudah Terproses	4	27	✓
46	SMP NEGERI 4 SENAYANG	60730345	SMP	Negeri	2018-08-29 19:15:17.187	Sudah Terproses	4	49	✓
47	SMP NEGERI 5 SENAYANG	60730346	SMP	Negeri	2018-08-29 15:35:12.947	Sudah Terproses	4	24	✓
48	SMP NEGERI 6 SENAYANG	11001531	SMP	Negeri	2018-08-24 18:47:39.713	Sudah Terproses	1	27	✓
49	SMP NEGERI 7 SENAYANG	11001532	SMP	Negeri	2018-09-23 22:53:06.807	Sudah Terproses	2	24	✗
50	SMP NEGERI 8 SENAYANG	11002606	SMP	Negeri	2018-09-06 20:46:12.020	Sudah Terproses	2	25	✗
51	SMP NEGERI 9 SENAYANG	11002607	SMP	Negeri	2018-08-28 20:50:18.773	Sudah Terproses	1	23	✗
52	SMP YPN MENSANAK	11001517	SMP	Swasta	-	Belum Kirim	0	0	✗

Teridentifikasi menggunakan aplikasi tidak resmi PMP bukan dari Kemendikbud

IKK 5. SMA yang telah dipetakan mutunya

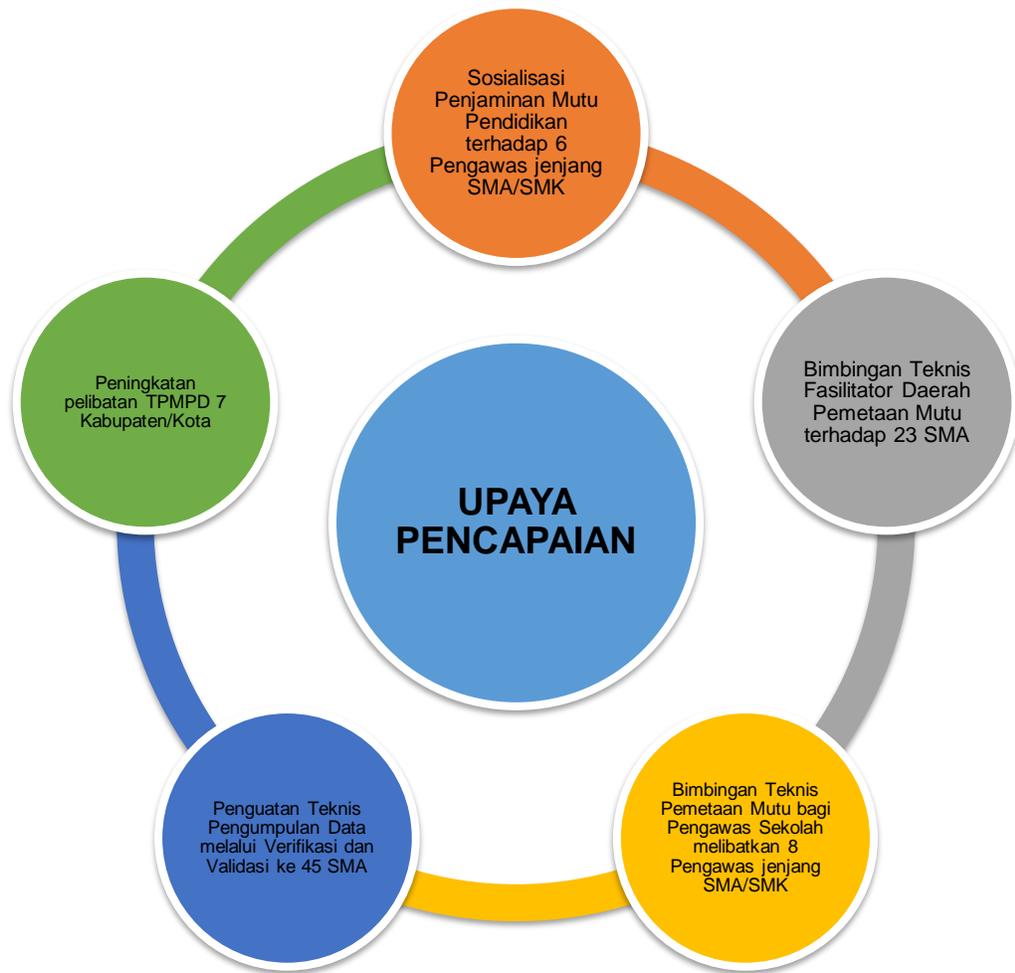
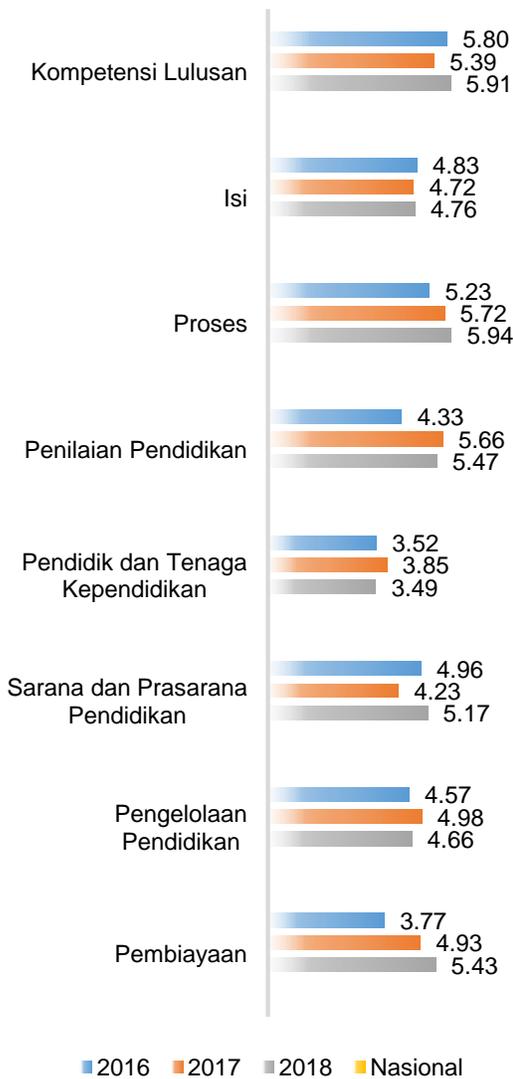
Realisasi 2017	2018			Target Renstra 2019	Capaian terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	Capaian		
100%	100%	98,40%	98,40%	100%	98,40%



Informasi - Keterangan Kategori Capaian

Status	Kategori	Status Bawah	Status Atas
★	Menuju SNP 1	0	2,04
★★	Menuju SNP 2	2,05	3,70
★★★	Menuju SNP 3	3,71	5,06
★★★★	Menuju SNP 4	5,07	6,66
★★★★★	Sudah SNP	6,67	7,00

**PETA CAPAIAN SNP SMA  
TAHUN 2016 S.D. 2018**



Catatan: 1 Pengawas SMA mewakili 1 s.d.7 SMA

**Outcome dari IKK 5. SMA yang telah dipetakan mutunya:**  
 123 SMA yang meningkat mutu pendidikannya  
**Penyerapan Anggaran:**  
 Rp. 166.656.950, (95,34% dari Rp. 2.184.696.000)

**KENDALA/PERMASALAHAN PEMETAAN MUTU JENJANG SMA**

**LANGKAH ANTISIPASI JENJANG SMA**

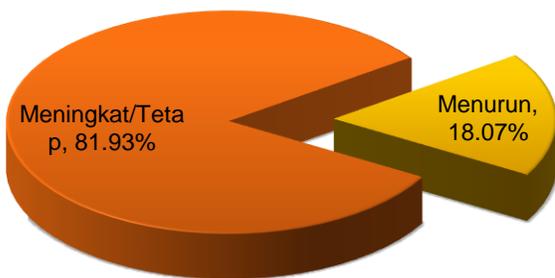
- Sekolah yang terdapat dalam Dapodik tidak update (sekolah yang sudah tidak beroperasi dan sekolah baru belum memiliki SNP masih/sudah terinput di/ke dalam Dapodik)
- Belum semua data peta mutu yang terkirim dapat diolah data mutunya
- Belm ada SMA berkategori SNP
- Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang skor 0
- Tersedia untuk tiap mata pelajaran skor 0
- Tersedia Kepala Tenaga Administrasi, Teknisi Laboran, Tenaga Laboran skor 0
- Memiliki laboratorium IPA sesuai standar skor 0
- Kondisi laboratorium kimia layak pakai skor 0
- Melakukan supervisi dengan baik skor 2,07

- Meningkatkan koordinasi dengan dinas provinsi/kabupaten/kota untuk memastikan sekolah yang ada di dalam Dapodik merupakan sekolah yang masih beroperasi
- Penyempurnaan aplikasi PMP
- Bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi terus meningkatkan koordinasi ke pihak internal (sekolah)
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi

IKK 6. SMA yang meningkat indeks efektifitasnya

Realisasi 2017	2018			Target Renstra 2019	Capaian terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	Capaian		
79,46%	80%	81,93%	102,41%	95%	86,24%

Persentase SMA yang Meningkat Rapor Mutunya Tahun 2018



**Permasalahan**

- Rapor mutu tahun 2018 belum semuanya diolah/dihasilkan (25 SMA belum terolah)
- Jaringan internet yang tidak mendukung

**Langkah Antisipasi**

- memberikan pemahaman lebih mendalam kepada Pengawas, Kepala Sekolah, dan Operator

**Upaya Pencapaian**



## Analisis:

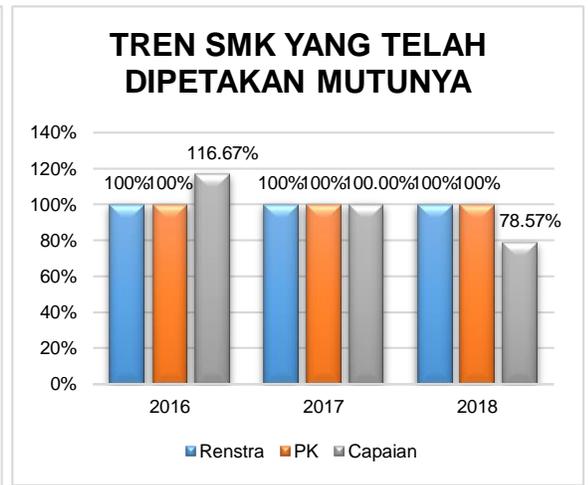
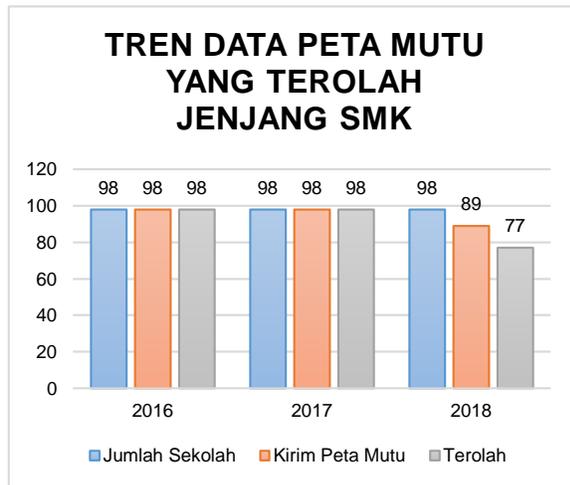
Tidak tercapainya target peningkatan rapor mutu SMA tahun 2018 diduga disebabkan oleh karena peningkatan kesadaran sekolah untuk mengisi instrument PMP sesuai dengan kondisi di lapangan. Pendampingan pemetaan mutu pendidikan oleh LPMP dan pengawas, serta dengan pemberian pemahaman tentang pentingnya akurasi rapor mutu terhadap penyusunan arah kebijakan dan inovasi peningkatan mutu pendidikan diduga berkontribusi terhadap penurunan angka rapor mutu. Dengan demikian validasi data rapor mutu pendidikan jenjang SMA lebih baik.

Provinsi Kepulauan Riau dengan geografisnya yang kepulauan yang mana banyak sekolah yang tidak terjangkau jaringan internet. Hal ini menyebabkan pihak sekolah terkendala untuk melakukan pengiriman peta mutu sekolah. Sekolah harus melakukan perjalanan laut terlebih dahulu untuk mendapatkan koneksi internet. Yang sering kali perjalanan laut ini tergantung cuaca. Berikut contoh beberapa sekolah yang belum mengirimkan peta mutu dan terletak pada daerah terluar provinsi Kepulauan Riau.

No	Nama Sekolah	NPSN	Bentuk	Status	Kirim Terakhir	Status Kirim	Jml Kirim	Jml Responden	Validasi
21	SMAN 1 KUNDUR	11000241	SMA	Negeri	2018-08-25 08:55:05.083	Sudah Terproses	5	51	✓
22	SMAN 3 KUNDUR	11002028	SMA	Negeri	2018-08-29 19:43:08.747	Sudah Terproses	1	30	✓
23	SMAN 5 KUNDUR	11002031	SMA	Negeri	-	Belum Kirim	0	0	✗
24	SMKS BUDI MULIA KUNDUR	11000205	SMK	Swasta	2018-08-13 09:06:39.060	Sudah Terproses	1	27	✓

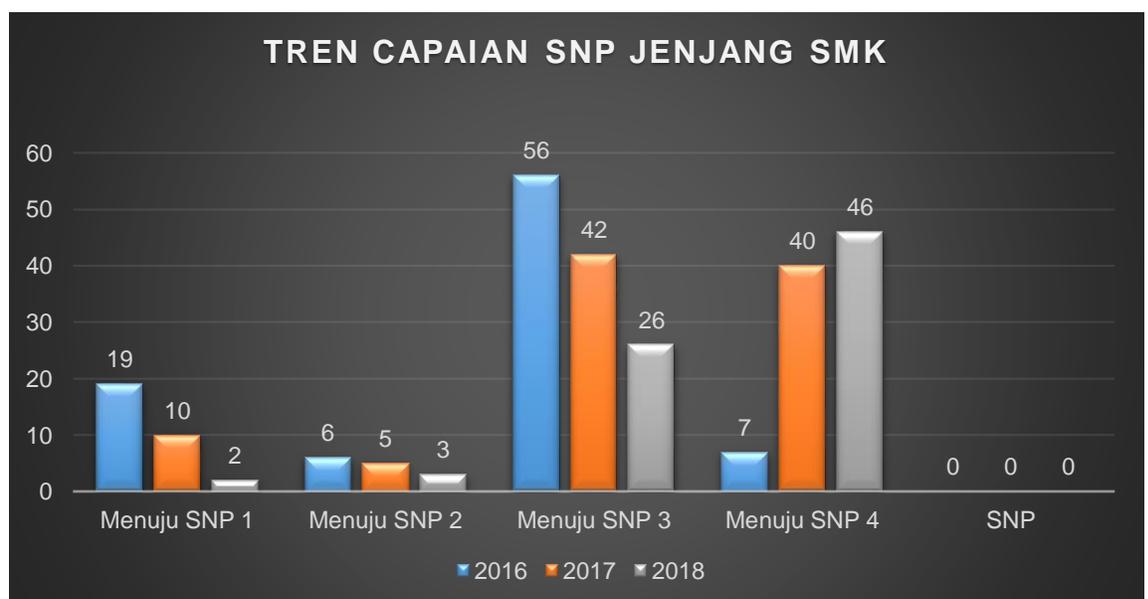
## IKK 7. SMK yang telah dipetakan mutunya

Realisasi 2017	2018			Target Renstra 2019	Capaian terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	Capaian		
98.98%	100%	87,76%	87,76%	100%	87,76%

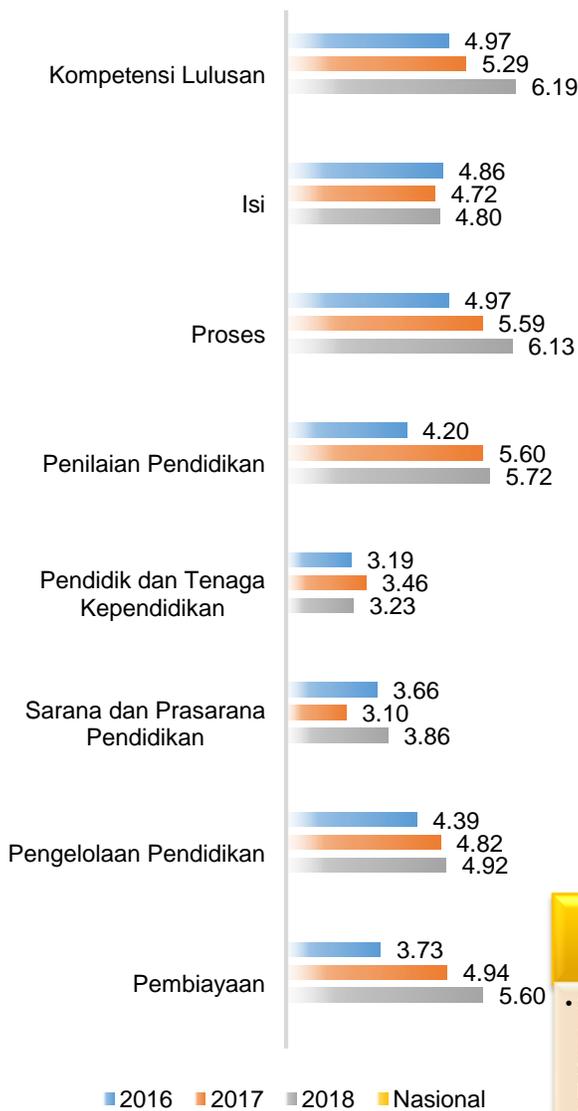


#### Informasi - Keterangan Kategori Capaian

Status	Kategori	Status Bawah	Status Atas
★	Menuju SNP 1	0	2,04
★★	Menuju SNP 2	2,05	3,70
★★★	Menuju SNP 3	3,71	5,06
★★★★	Menuju SNP 4	5,07	6,66
★★★★★	Sudah SNP	6,67	7,00



**PETA CAPAIAN SNP SMK  
TAHUN 2016 S.D. 2018**



Catatan: 1 Pengawas SMK mewakili 1 s.d. 7 SMK

**Outcome dari IKK 7. SMK yang telah dipetakan mutunya:**  
89 SMK yang meningkat mutu pendidikannya  
**Penyerapan Anggaran:**  
Rp. 145.824.831, (95,34% dari Rp. 2.184.696.000)

**KENDALA/PERMASALAHAN PEMETAAN MUTU JENJANG SMK**

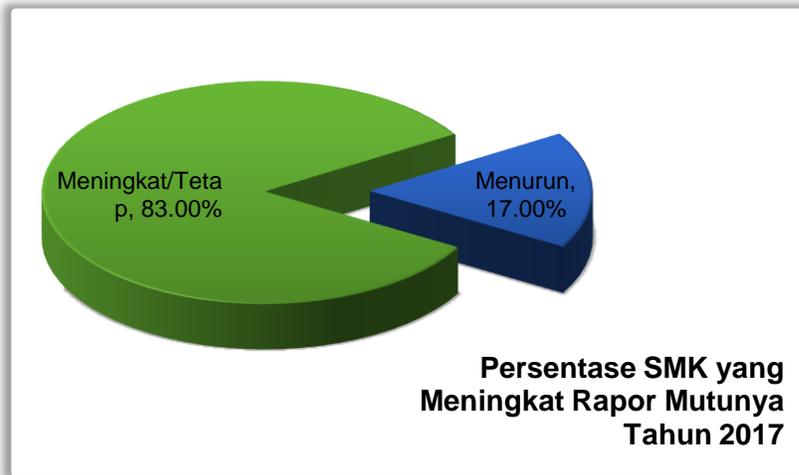
- Sekolah yang terdapat dalam Dapodik tidak *update* (sekolah yang sudah tidak beroperasi dan sekolah baru belum memiliki SNP masih/sudah terinput di/ke dalam Dapodik)
- Belum semua data peta mutu yang terkirim dapat diolah data mutunya
- Belum ada SMK berkategori SNP
- Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang skor 0
- Tersedia untuk tiap mata pelajaran skor 0
- Tersedia Kepala Tenaga Administrasi, Teknisi Laboran, Tenaga Laboran skor 0
- Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa skor 0
- Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa skor 0
- Kondisi laboratorium kimia layak pakai skor 0
- Melakukan supervisi dengan baik skor 1,72

**LANGKAH ANTISIPASI JENJANG SMK**

- Meningkatkan koordinasi dengan dinas provinsi/kabupaten/kota untuk memastikan sekolah yang ada di dalam Dapodik merupakan sekolah yang masih beroperasi
- Penyempurnaan aplikasi PMP
- Bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi terus meningkatkan koordinasi ke pihak internal (sekolah)
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi

IKK 8. SMK yang meningkat indeks efektifitasnya

Realisasi 2017	2018			Target Renstra 2019	Capaian terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	Capaian		
78,41%	75%	83%	118,57%	95%	87,37%

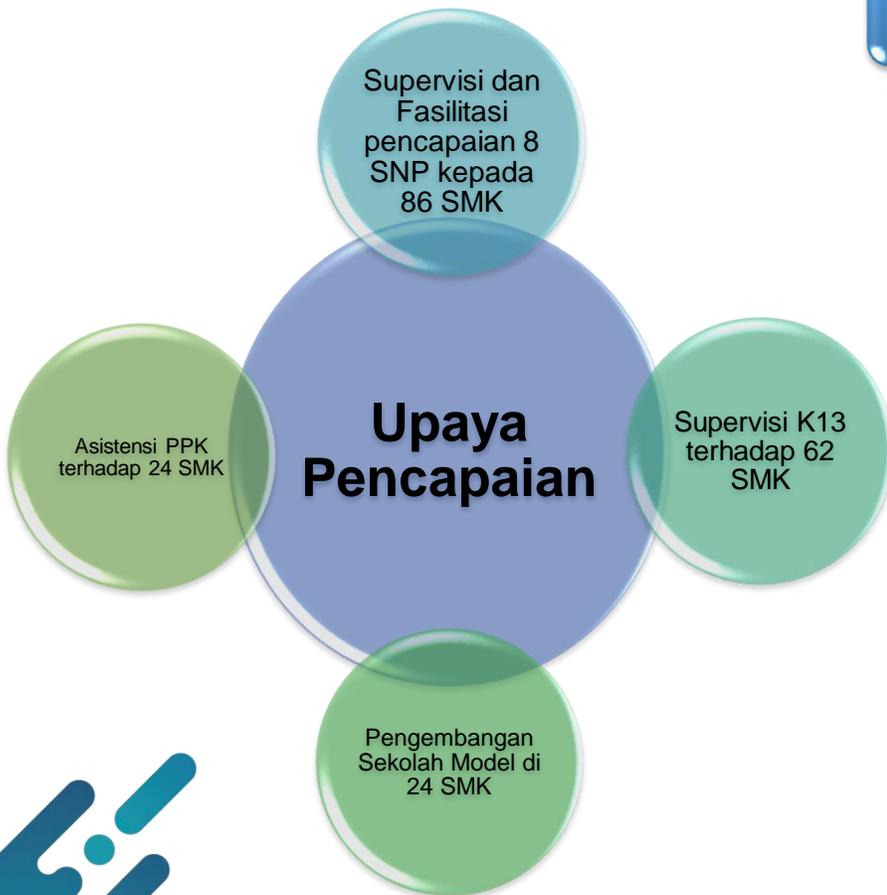


**Permasalahan**

- Rapor mutu tahun 2018 belum semuanya diolah/dihasilkan (25 SMK belum terolah)
- Koneksi internet kurang bagus

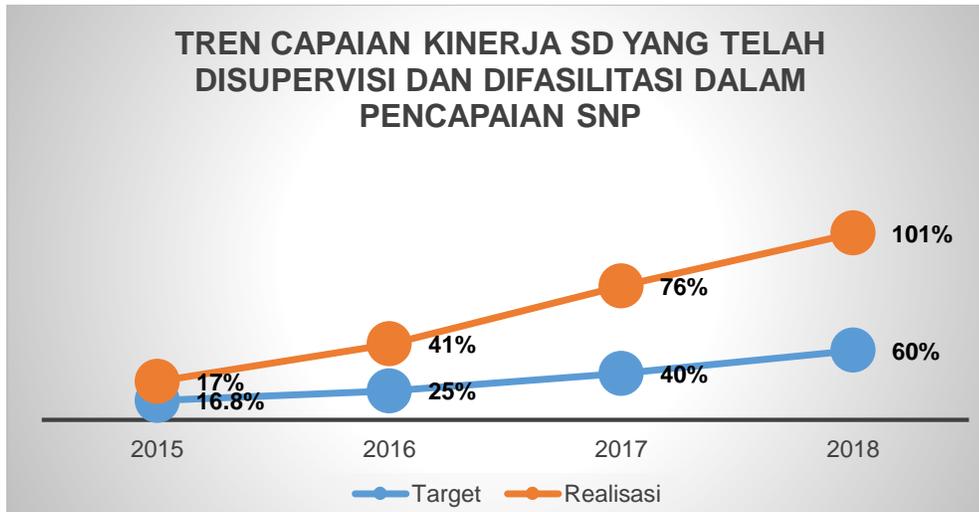
**Langkah Antisipasi**

- memberikan pemahaman lebih mendalam kepada Pengawas, Kepala Sekolah, dan Operator

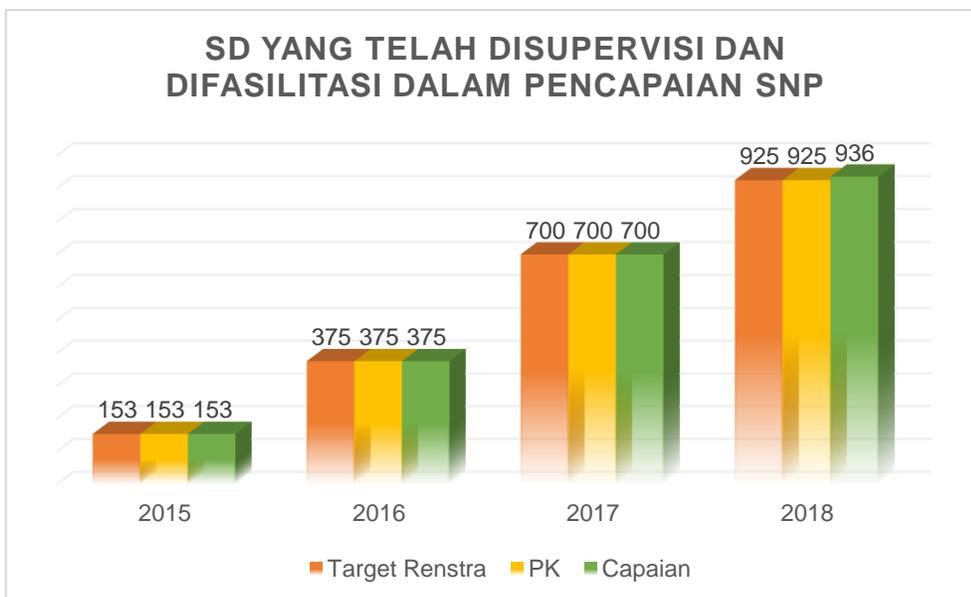


Anggaran yang terserap pada sasaran 1. sebesar Rp.1.821.275.972 atau 94,94% dari pagu Rp. 1.918.289.000.

## IKK 9. SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP



Realisasi 2017	2018			Target Renstra 2019	Capaian terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	%		
41.02%	925	936	100,19%	80%	125.24%





## Upaya Pencapaian



Fasilitasi dan Supervisi Sekolah Model

Bimbingan Teknis SPMI untuk 57 SD  
Pendampingan 57 SD Model dan 270 Sekolah Imbas  
Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi 57 SD Model



Fasilitasi dan Supervisi SPME

Bimbingan Teknis SPME di 7 Kabupaten/Kota dan Provinsi  
Monitoring dan Evaluasi di & Kabupaten/Kota dan Provinsi  
Diseminasi Hasil Sekolah Model, dan TPMPD pada 7 Kabupaten/Kota dan Provinsi



Fasilitasi dan Pendampingan K13

Bimbingan Teknis 196 orang Tim Pengembang Kurikulum 2013  
Pendampingan 236 SD Pelaksana Kurikulum 2013  
Bimbingan Teknis Penyebaran K13 (PPK) Tingkat Kabupaten/ Kota untuk Sekolah Model  
Monitoring dan Evaluasi 225 SD Pelaksana K13

## Permasalahan

- Terdapat beberapa sekolah model yang merger
- Besaran dana bantuan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi geografis Kepulauan Riau
- Data sekolah sasaran K13 kurang valid
- Waktu pelaksanaan rangkaian kegiatan di tingkat pusat kurang awal
- Jumlah guru sekolah sasaran K13 tidak memenuhi kuota
- Kondisi geografis SD sasaran pelaksana Kurikulum 2013 di Kecamatan Tambelan, Bintan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pendampingan K13 dengan rentang waktu yang ideal.

## Langkah Antisipasi

- Penggantian sasaran sekolah model dan penataan imbasnya
- Mengusulkan penambahan besaran bantuan
- Mengupayakan pelaksanaan kegiatan lebih awal
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi terkait usulan sekolah model tahun 2018 dan validasi sekolah sasaran K13.
- Penyesuaian jadwal pendampingan K13 di Kecamatan Tambelan, Bintan sesuai dengan jadwal transportasi yang tersedia.

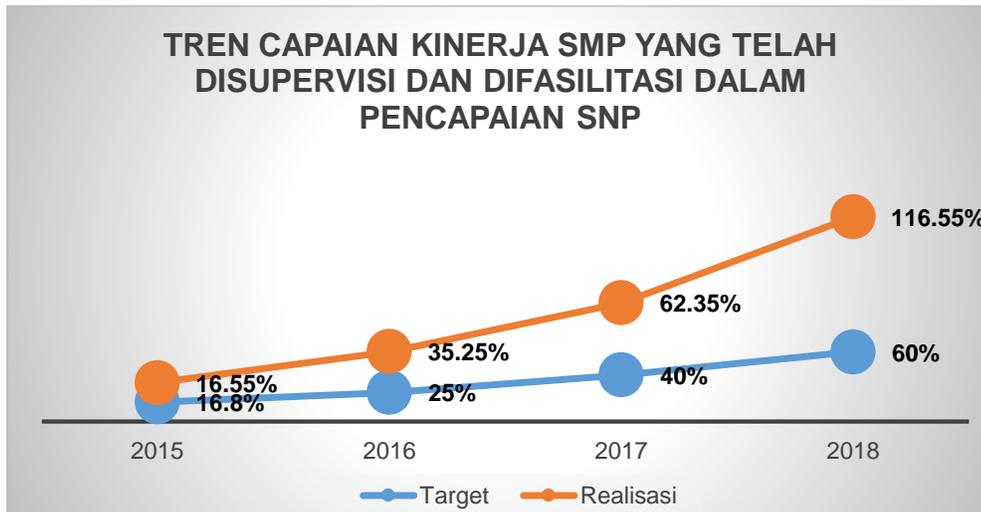
**Penyerapan Anggaran IKK 9. SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP: Rp. 4.151.202.709, (97,97% dari Rp. 4.237.218.239)**

**Analisis**

Dampak dari pelaksanaan pelaksanaan fasilitasi dan supervisi SD dalam peningkatan SNP telah dirasakan oleh SD model pada proses pemenuhan 8 SNP di sekolah. Melalui pelaksanaan SPMI sekolah, sekolah mulai melakukan penyusunan RKAS berbasis rapor mutu dan analisis kebutuhan. Sekolah juga sudah mulai melakukan program inovasi pemenuhan 8 SNP yang didasari dari hasil pemetaan mutu tingkat satuan pendidikan. Contoh-contoh baik pelaksanaan program inovasi tersebut disampaikan pada kegiatan Diseminasi dan Seminar Hasil SPMI. Salah satu program inovasi SD model yaitu SDN 001 Singkep bahkan mendapatkan penghargaan sebagai program inovasi terbaik di Kabupaten Lingga dan juara ke-3 di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

Komitmen dan upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah tak terlepas dari peran pemerintah daerah. Melalui TPMPD, LPMP Kepulauan Riau melakukan pemantapan tugas dan fungsi TPMPD. Saat ini, TPMPD Kabupaten Karimun telah ditetapkan melalui SK Bupati Karimun, dan masing-masing pokja telah memiliki anggaran yang mendukung program kerjanya. TPMPD Kabupaten Natuna sedang dalam proses pengajuan SK Bupati Natuna dan pengajuan anggaran pada APBD Kabupaten Natuna untuk Tahun Anggaran 2019. Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna juga sudah memasukkan program khusus untuk Sekolah Model SPMI dengan APBD Kabupaten Natuna untuk Tahun Anggaran 2019.

**IKK 10. SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP**



Realisasi 2017	2018			Target Renstra 2019	Capaian terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	%		
45.67%	417	486	116,55%	80%	145.69%

**Penyerapan Anggaran IKK 10. SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP:**  
 Rp. 4.660.266.406, (98,28% dari Rp. 4.741.825.810)



Fasilitasi dan Supervisi Sekolah Model



- Bimbingan Teknis SPMI untuk 42 SMP
- Pendampingan 42 SMP Model dan 146 Sekolah Imbas Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi 42 SMP Model

Fasilitasi dan Supervisi SPME



- Bimbingan Teknis SPME di 7 Kabupaten/Kota dan Provinsi
- Monitoring dan Evaluasi di 7 Kabupaten/Kota dan Provinsi
- Diseminasi Hasil Sekolah Model, dan TPMPD pada 7 Kabupaten/Kota dan Provinsi

Fasilitasi dan Pendampingan K13



- Bimbingan Teknis 246 orang Tim Pengembang Kurikulum 2013
- Pendampingan 226 SMP Pelaksana Kurikulum 2013
- Bimbingan Teknis Penyegaran K13 (PPK) Tingkat Kabupaten/ Kota untuk Sekolah Model
- Monitoring dan Evaluasi 157 SMP Pelaksana K13

# Upaya Pencapaian



## Analisis

Perubahan status dari sekolah model SPMI menjadi sekolah rujukan berdampak pada pemenuhan realisasi kinerja LPMP Kepulauan Riau. Terbatasnya jumlah sekolah yang terdapat di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas menyebabkan penggantian sekolah model diambil dari sekolah yang berasal dari Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Hal ini berdampak pada capaian realisasi program sekolah model pada jenjang SMP yaitu 42 SMP dari target 43 SMP.

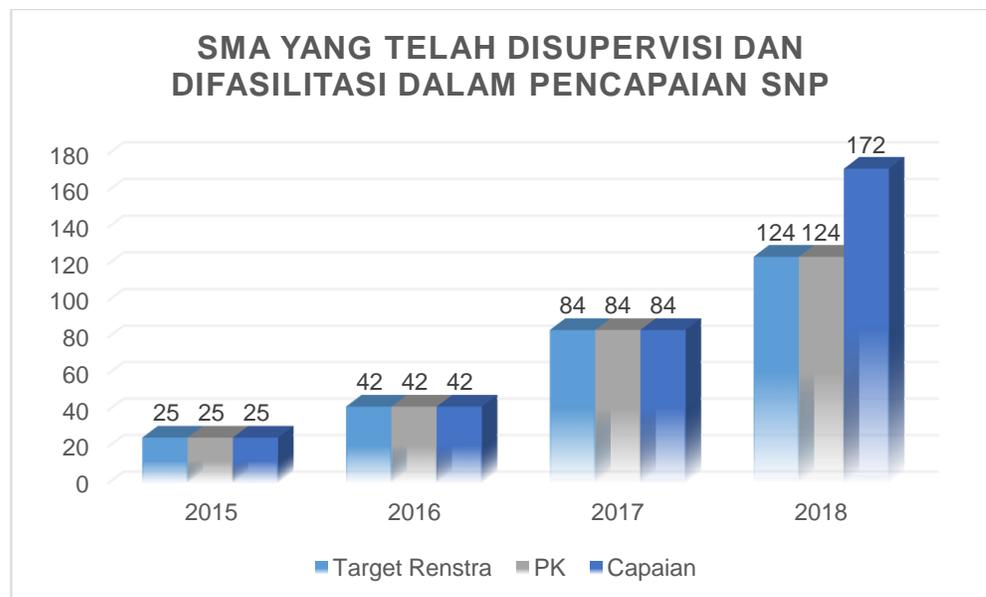
Dampak dari pelaksanaan pelaksanaan fasilitasi dan supervisi SMP dalam peningkatan SNP telah dirasakan oleh SMP model pada proses pemenuhan 8 SNP di sekolah. Melalui pelaksanaan SPMI sekolah, sekolah mulai melakukan penyusunan RKAS berbasis rapor mutu dan analisis kebutuhan. Sekolah juga sudah mulai melakukan program inovasi pemenuhan 8 SNP yang didasari dari hasil pemetaan mutu tingkat satuan pendidikan. Contoh-contoh baik pelaksanaan program inovasi tersebut disampaikan pada kegiatan Diseminasi dan Seminar Hasil SPMI.

Komitmen dan upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah tak terlepas dari peran pemerintah daerah. Melalui TPMPD, LPMP Kepulauan Riau melakukan pementapan tugas dan fungsi TPMPD. Saat ini, TPMPD Kabupaten Karimun telah ditetapkan melalui SK Bupati Karimun, dan masing-masing pokja telah memiliki anggaran yang mendukung program kerjanya. TPMPD Kabupaten Natuna sedang dalam proses pengajuan SK Bupati Natuna dan pengajuan anggaran pada APBD Kabupaten Natuna untuk Tahun Anggaran 2019. Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna juga sudah memasukkan program khusus untuk Sekolah Model SPMI dengan APBD Kabupaten Natuna untuk Tahun Anggaran 2019.

IKK 11. SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP



Realisasi 2017	2018			Target Renstra 2019	Capaian terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	%		
51.59%	124	172	138,71%	80%	173.39%



## Upaya Pencapaian



### Fasilitasi dan Supervisi Sekolah Model

- Bimbingan Teknis SPMI untuk 31 SMA
- Pendampingan 31 SMA Model dan 75 Sekolah Imbas
- Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi 31 SMA Model



### Fasilitasi dan Supervisi SPME

- Bimbingan Teknis SPME di 7 Kabupaten/Kota dan Provinsi
- Monitoring dan Evaluasi di 7 Kabupaten/Kota dan Provinsi
- Diseminasi Hasil Sekolah Model, dan TPMPD pada 7 Kabupaten/Kota dan Provinsi



### Fasilitasi dan Pendampingan K13

- Bimbingan Teknis 145 orang Tim Pengembang Kurikulum 2013
- Pendampingan 88 SMA Pelaksana Kurikulum 2013
- Bimbingan Teknis Penyegaran K13 (PPK) Tingkat Kabupaten/ Kota untuk Sekolah Model
- Monitoring dan Evaluasi 40 SMA Pelaksana K13

## Permasalahan

- Sasaran sekolah model berubah status menjadi sekolah rujukan
- Besaran dana bantuan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi geografis Kepulauan Riau
- Waktu pelaksanaan rangkaian kegiatan di tingkat pusat kurang awal
- Jumlah guru sekolah sasaran K13 tidak memenuhi kuota
- Kondisi geografis SMA sasaran pelaksana Kurikulum 2013 di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan; dan Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pendampingan K13 dengan rentang waktu yang ideal.

## Langkah Antisipasi

- Penggantian sasaran sekolah model dan penataan imbasnya
- Mengusulkan penambahan besaran bantuan
- Mengupayakan pelaksanaan kegiatan lebih awal
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi terkait usulan sekolah model tahun 2018 dan validasi sekolah sasaran K13.
- Penyesuaian jadwal pendampingan K13 di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan; dan Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga sesuai dengan jadwal transportasi yang tersedia.

**Penyerapan Anggaran IKK 11. SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP:**

Rp. 2.504.820.899, (97,86% dari Rp. 2.559.596.259)

**Analisis**

Perubahan status dari sekolah model SPMI menjadi sekolah rujukan berdampak pada pemenuhan realisasi kinerja LPMP Kepulauan Riau. Terbatasnya jumlah sekolah yang terdapat di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas menyebabkan penggantian sekolah model diambil dari sekolah yang berasal dari Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Hal ini berdampak pada capaian realisasi program sekolah model pada jenjang SMA yaitu 31 SMA dari target 30 SMA.

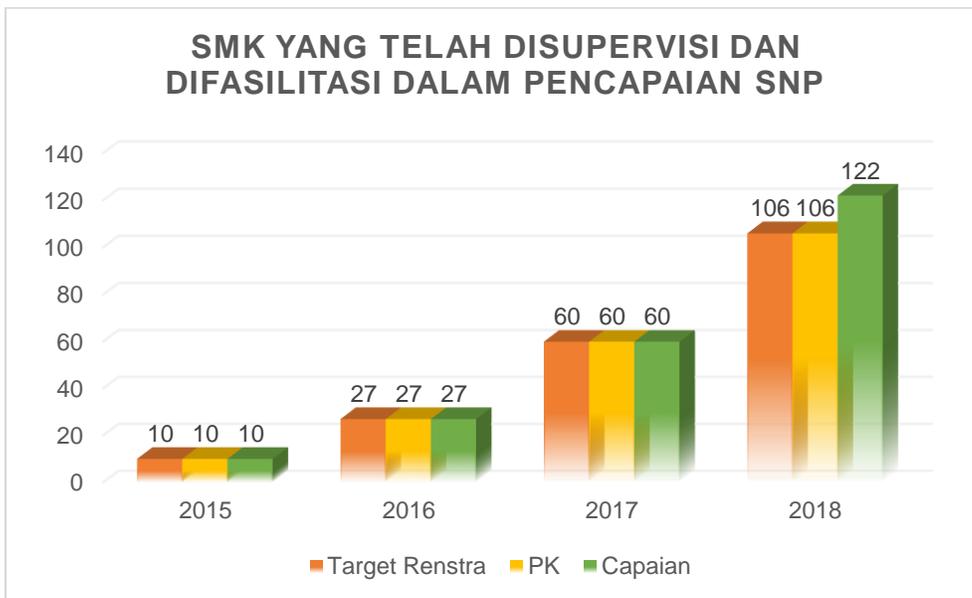
Angka realisasi fasilitasi dan supervisi sekolah pelaksana Kurikulum 2013 jenjang SMA juga mengalami peningkatan yaitu 88 sekolah dari target 40 SMA sasaran atau secara persentase realisasinya sekitar 220%. Hal ini sebagai dampak dari jumlah guru pada sebagian besar SMA sasaran tidak memenuhi kuota 18 orang per sekolah. Untuk memenuhi kuota tersebut, dilakukan pendampingan IN service 1 dan 2 terhadap guru dari sekolah sasaran K13 tahun sebelumnya yang belum mendapatkan pelatihan dan pendampingan K13.

Dampak dari pelaksanaan pelaksanaan fasilitasi dan supervisi SMA dalam peningkatan SNP telah dirasakan oleh SMA model pada proses pemenuhan 8 SNP di sekolah. Melalui pelaksanaan SPMI sekolah, sekolah mulai melakukan penyusunan RKAS berbasis rapor mutu dan analisis kebutuhan. Sekolah juga sudah mulai melakukan program inovasi pemenuhan 8 SNP yang didasari dari hasil pemetaan mutu tingkat satuan pendidikan. Contoh-contoh baik pelaksanaan program inovasi tersebut disampaikan pada kegiatan Diseminasi dan Seminar Hasil SPMI.

**IKK 12. SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP**



Realisasi 2017	2018			Target Renstra 2019	Capaian terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	%		
57.14%	106	122	115,09%	80%	143.86%



**Penyerapan Anggaran IKK 12. SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP:**  
 Rp. 2.289.578.904, (97,58% dari Rp. 2.346.360.836)

### Analisis

Perubahan status dari sekolah model SPMI menjadi sekolah rujukan berdampak pada pemenuhan realisasi kinerja LPMP Kepulauan Riau. Terbatasnya jumlah sekolah yang terdapat di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas menyebabkan penggantian sekolah model diambil dari sekolah yang berasal dari Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Hal ini berdampak pada capaian realisasi program sekolah model pada jenjang SMK yaitu 24 SMK dari target 28 SMK.

Angka realisasi fasilitasi dan supervisi sekolah pelaksana Kurikulum 2013 jenjang SMK juga mengalami peningkatan yaitu 62 sekolah dari target 46 SMK sasaran atau secara persentase realisasinya sekitar 134,78%. Hal ini sebagai dampak dari jumlah guru pada sebagian besar SMK sasaran tidak memenuhi kuota 11 orang per sekolah. Untuk memenuhi kuota tersebut, dilakukan pendampingan IN service 1 dan 2 terhadap guru dari sekolah sasaran K13 tahun sebelumnya yang belum mendapatkan pelatihan dan pendampingan K13.

Dampak dari pelaksanaan pelaksanaan fasilitasi dan supervisi SMK dalam peningkatan SNP telah dirasakan oleh SMK model pada proses pemenuhan 8 SNP di sekolah. Melalui pelaksanaan SPMI sekolah, sekolah mulai melakukan penyusunan RKAS berbasis rapor mutu dan analisis kebutuhan. Sekolah juga sudah mulai melakukan program inovasi pemenuhan 8 SNP yang didasari dari hasil pemetaan mutu tingkat satuan pendidikan. Salah satu SMK model Contoh-contoh baik pelaksanaan program inovasi tersebut disampaikan pada kegiatan Diseminasi dan Seminar Hasil SPMI. Salah satu program inovasi SMK model yaitu SMKN 001 Singkep bahkan mendapatkan penghargaan sebagai program inovasi terbaik di Provinsi Kepulauan Riau dan juara pertama tingkat nasional.

- Sasaran sekolah model berubah status menjadi sekolah rujukan
- Besaran dana bantuan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi geografis Kepulauan Riau
- Terdapat sekolah model SMK yang mengundurkan diri
- Waktu pelaksanaan rangkaian kegiatan di tingkat pusat kurang awal
- Anggaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur K13 Jenjang SMK tidak memadai
- Jumlah guru sekolah sasaran K13 tidak memenuhi kuota
- Terdapat sekolah sasaran K13 jenjang SMK yang sudah tutup/tidak beroperasi namun masih terdaftar di Dapodikdamen

## Permasalahan



- Penggantian sasaran sekolah model dan penataan imbasnya
- Mengusulkan penambahan besaran bantuan
- Mengupayakan pelaksanaan kegiatan lebih awal
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi terkait usulan sekolah model tahun 2018 dan validasi sekolah sasaran K13.

## Langkah Antisipasi



## Upaya Pencapaian



### Fasilitasi dan Supervisi Sekolah Model

- Bimbingan Teknis SPMI untuk 24 SMK
- Pendampingan 24 SMK Model dan 59 Sekolah Imbas
- Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi 25 SMA Model



### Fasilitasi dan Supervisi SPME

- Bimbingan Teknis SPME di 7 Kabupaten/Kota dan Provinsi
- Monitoring dan Evaluasi di 7 Kabupaten/Kota dan Provinsi
- Diseminasi Hasil Sekolah Model, dan TPMPD pada 7 Kabupaten/Kota dan Provinsi



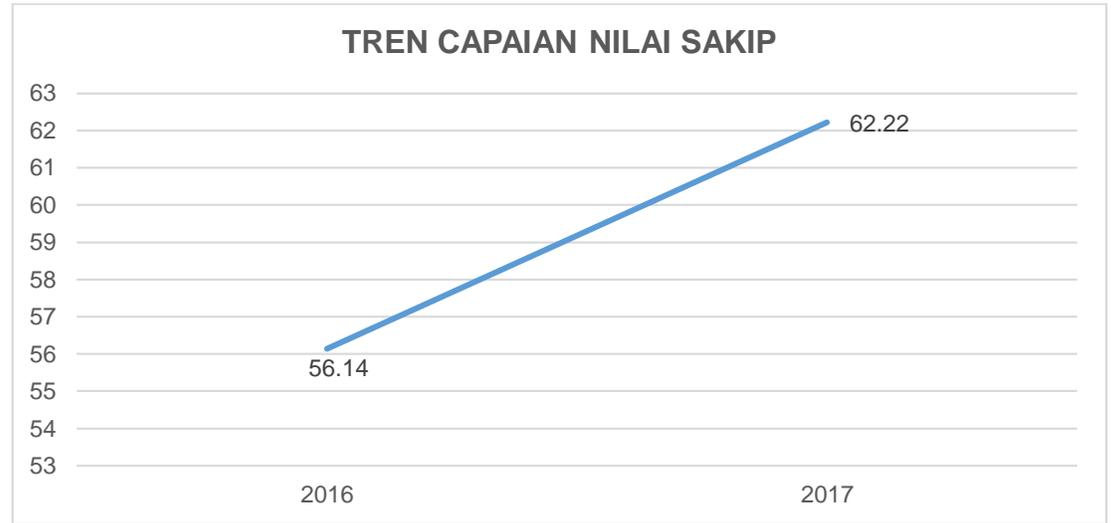
### Fasilitasi dan Pendampingan K13

- Bimbingan Teknis 145 orang Tim Pengembang Kurikulum 2013
- Pendampingan 62 SMK Pelaksana Kurikulum 2013
- Bimbingan Teknis Penyegaran K13 (PPK) Tingkat Kabupaten/ Kota untuk Sekolah Model
- Monitoring dan Evaluasi 46 SMK Pelaksana K13

## Sasaran #2

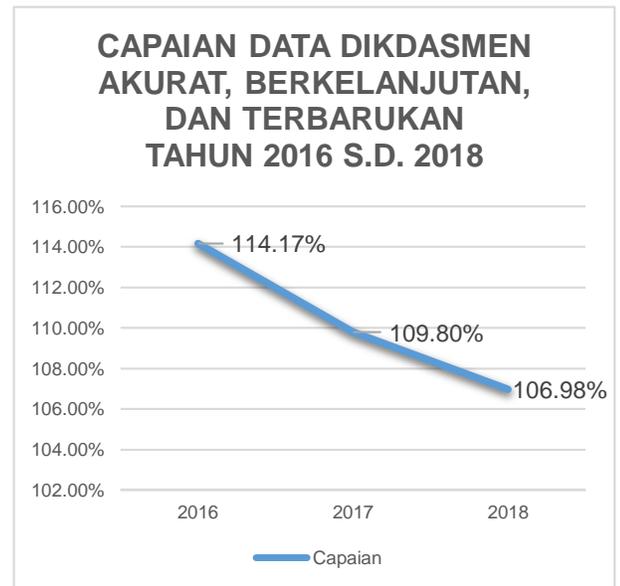
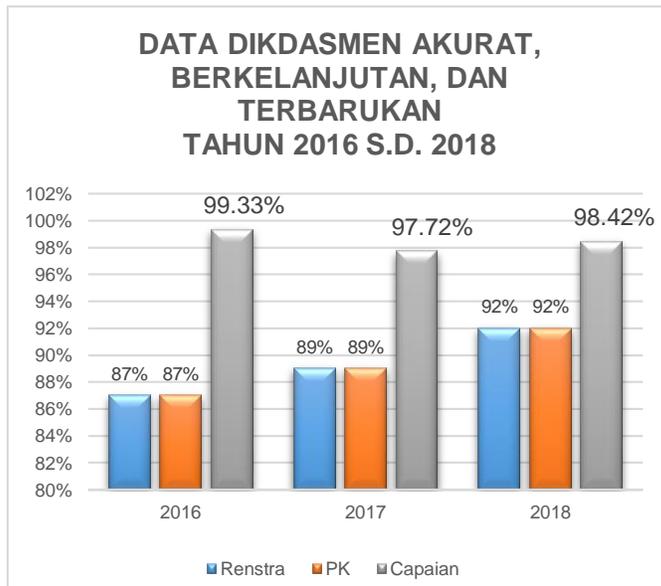
### Terwujudnya Tata kelola LPMP Kepulauan Riau yang baik

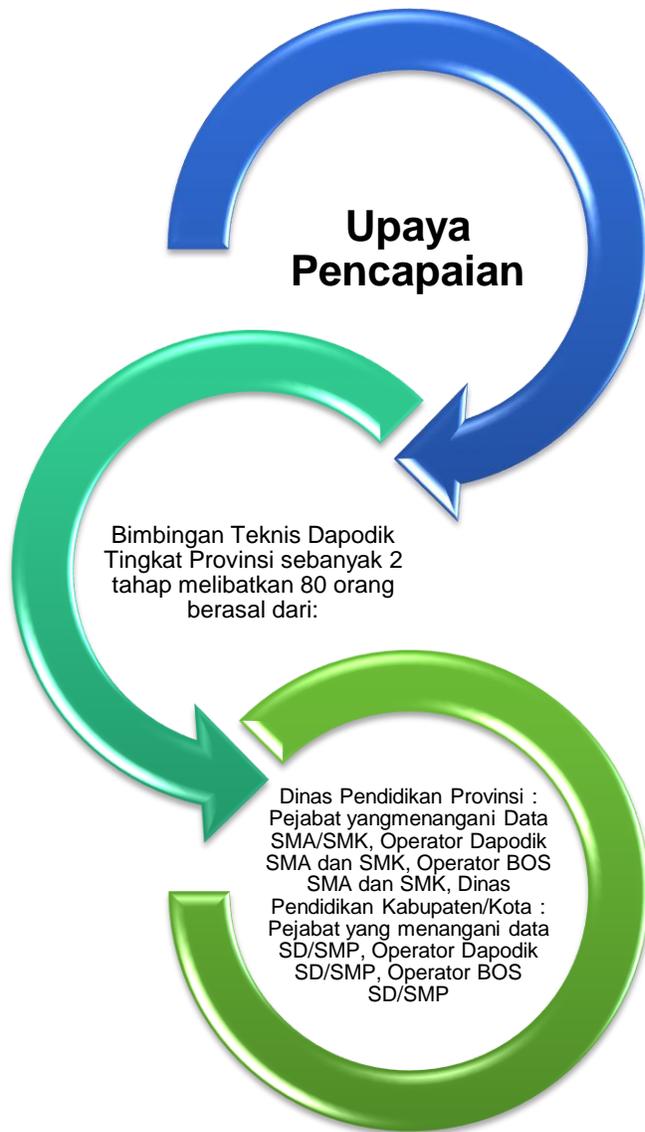
Kategori	Range Nilai	Interpretasi
AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
A	> 80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
BB	> 70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
B	> 60 - 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
C	> 30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.



**IKK 13. Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan**

Realisasi 2017	2018			Target Renstra 2019	Capaian terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	Capaian		
97,72%	92%	98,42%	106,98%	95%	103,60%





OUTCOME SASARAN 2 YAITU 98,42% DATA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH AKURAT, BERKELANJUTAN, DAN TERBARUKAN. DAN ANGGARAN YANG TERSERAP PADA SASARAN 2. SEBESAR RP.261.935.897 ATAU 98,22% DARI PAGU RP.266.680.000.



**Permasalahan**

- Sekolah tanpa peserta didik dan rombel masih tercantum dalam aplikasi Dapodik
- Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kesulitan untuk menutup sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi

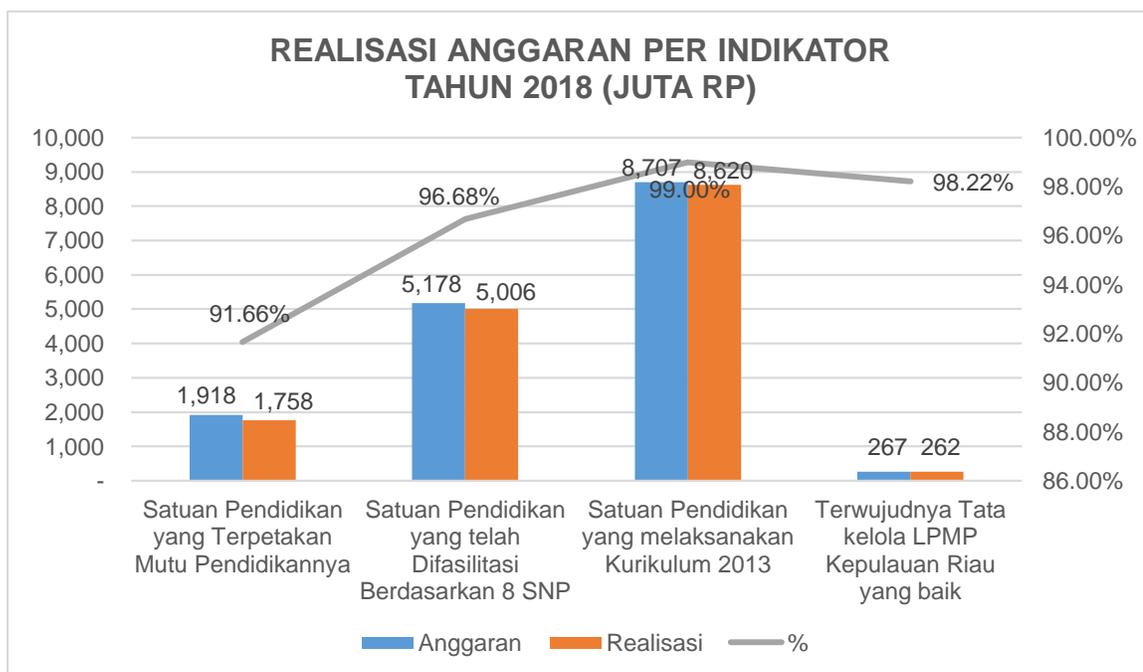
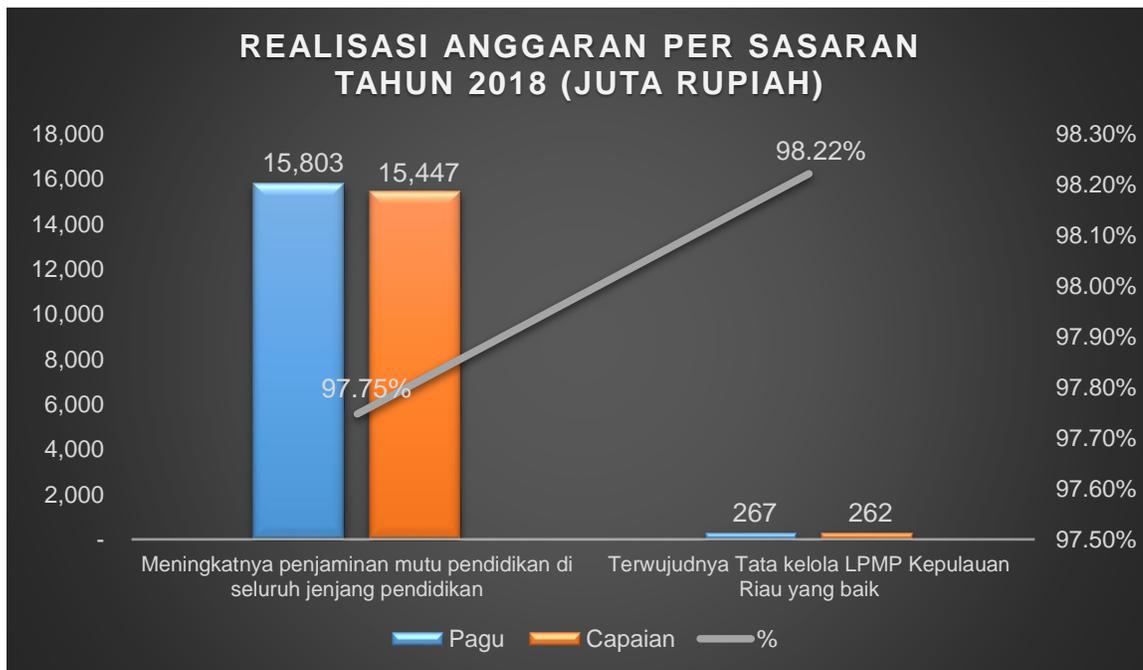


**Langkah Antisipasi**

- LPMP Kepulauan Riau melakukan pendataan sekolah yang sudah tidak beroperasi dengan berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- Melakukan verifikasi dan validasi secara langsung ke sekolah maupun tidak langsung melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

**B. Realisasi Anggaran**

Pagu anggaran LPMP Kepulauan Riau dalam DIPA tahun 2018 sebesar Rp.41.114.461.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp.39,626,849,541 dengan persentase daya serap sebesar 96%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 sasaran dengan 14 indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.



**C. Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran**

Pada tahun 2018, LPMP Kepulauan Riau berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp.1.548.771.000,00. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari kegiatan yang semula dianggarkan untuk paket meeting fullboard di hotel, kemudian dilaksanakan menggunakan fasilitas yang sudah tersedia di LPMP Kepulauan Riau yaitu Asrama, Aula, Gedung Kelas, Dapur, dan Ruang Makan. Anggaran hasil efisiensi dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas dengan melibatkan stakeholders dan pihak terkait seperti: - Analisis Instrumen Pemetaan Mutu (PMP) - Pemetaan/Pemantauan Ujian Nasional - FGD Pengembangan Kemitraan Peningkatan Mutu dengan Pemda/DPRD - *Benchmarking* Penjaminan Mutu Pendidikan -Penyusunan Bahan Supervisi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) - Supervisi Mutu ke Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) - Analisis Hasil Supervisi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) - Asistensi PPK Tingkat Provinsi -Supervisi Sekolah *Piloting* PPK - Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 berupa kegiatan: a. Bimtek Penyegaran K13 (PPK) Tingkat Kab/Kota. Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur K13 Tingkat Kabupaten/Kota - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa pembuatan taman dan penghijauan (penanaman pohon) sekitar kantor.

LPMP Kep. Riau juga melaksanakan optimalisasi anggaran sebesar Rp.734.656.000,00 dengan mengadakan kegiatan Pengembangan Peran dan Kapasitas LPMP melalui Fungsi Kepengawasan serta Layanan Data & Informasi LPMP: *School Mapping* SD dan SMP Kabupaten Bintan

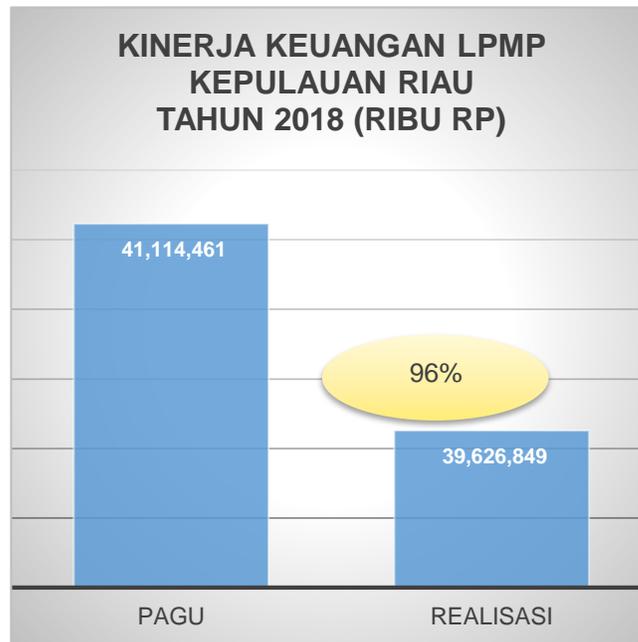
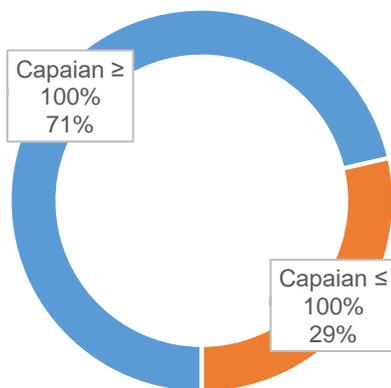


KOLEKSI FOTO PROGRAM PENGHIJAUAN LPMP KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018

## BAB IV PENUTUP

Selama tahun 2018, LPMP Kepulauan Riau berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA LPMP KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018



Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Rapor mutu yang dihasilkan melebihi batas waktu yang dijanjikan dan belum mencakup seluruh sekolah.
2. Terdapat perbedaan pemahaman dalam cara menghitung indeks efektifitas baik secara internal LPMP Kepulauan Riau maupun di tingkat nasional.
3. Perbedaan data awal antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi beserta Direktorat Jenderal Dikdasmen dan LPMP Kepulauan Riau terkait sekolah model dan sekolah rujukan.
4. Belum ada pedoman penyelenggaraan fasilitasi yang baku.
5. Belum ada satupun sekolah di Kepulauan Riau yang mencapai kategori SNP.
6. Keterbatasan jumlah SDM LPMP Kepulauan Riau yang menyebabkan keterbatasan pelaksanaan kegiatan secara serentak di 7 Kabupaten/Kota.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Penyempurnaan aplikasi PMP sehingga dapat menghasilkan rapor mutu lebih awal sekaligus lengkap (tidak sebagian).

2. Perlu pemahaman yang sama dalam hal cara menghitung indeks efektifitas sehingga terdapat keseragaman di seluruh LPMP yang pada akhirnya akan menghasilkan data yang lebih akurat. Data yang akurat dari masing-masing satuan kerja akan memberikan data yang akurat pada tingkat yang lebih tinggi (Eselon I).
3. Perlunya sinkronisasi data lebih awal antara Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan LPMP Kepulauan Riau beserta Direktorat Jenderal Dikdasmen terkait sekolah model dan sekolah rujukan, sehingga irisan antara sekolah model dan sekolah rujukan tidak terjadi;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen membuat pedoman penyelenggaraan yang baku mengenai penyelenggaraan fasilitasi sebelum program fasilitasi berjalan, sehingga perubahan saat kegiatan berlangsung dapat diminimalkan.
5. Perlu keterlibatan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan peningkatan 8 SNP.
6. Jumlah PNS LPMP Kepulauan Riau perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi lebih cepat dan optimal tanpa adanya hambatan keterbatasan SDM.

## LAMPIRAN

---

1. PERJANJIAN KINERJA
2. PENGUKURAN KINERJA
3. *OUTPUT* DAN *OUTCOME* INDIKATOR KINERJA TAHUN  
2018

## PERJANJIAN KINERJA

---



**Perjanjian Kinerja Tahun 2018  
Kepala LPMP Kepulauan Riau  
dengan  
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah**

### TUGAS

Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

### FUNGSI

1. Melakukan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
3. Melakukan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
4. Melakukan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Melaksanakan kerjasama di bidang penjaminan mutu pendidikan;
6. Melaksanakan urusan administrasi LPMP

## TARGET CAPAIAN

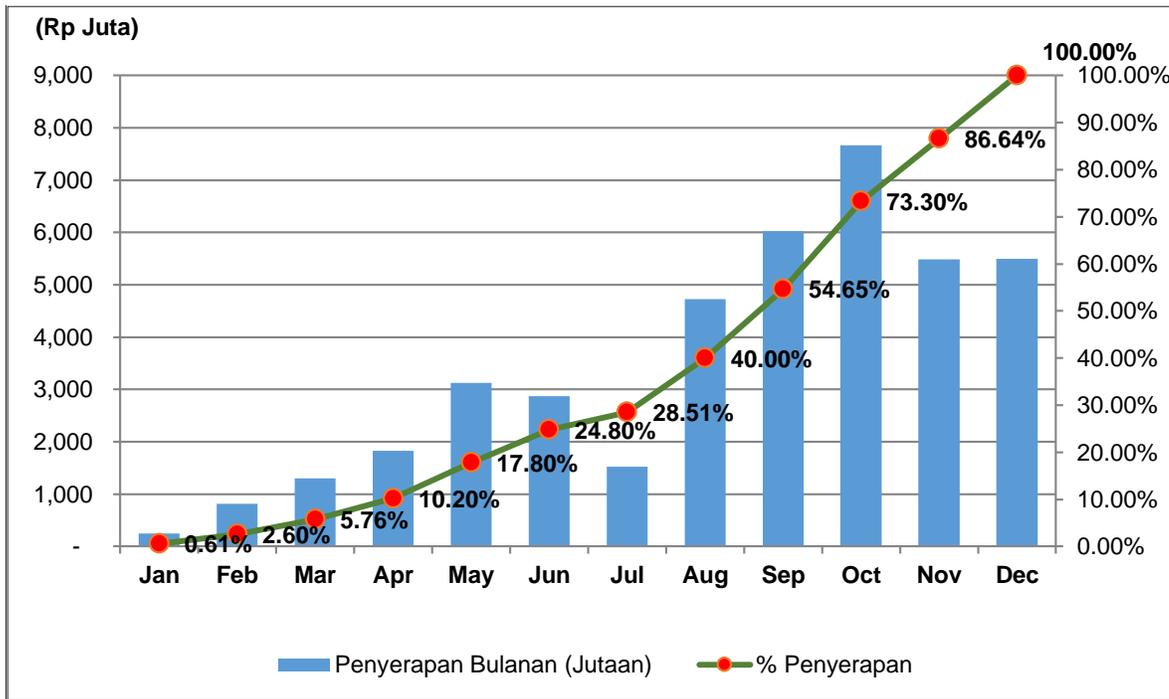
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	ANGGARAN	
1	2	3	4	
1. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	<b>Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</b>	1.478 Sekolah	<b>1.918.289.000</b>	
	1 SD yang telah dipetakan mutunya	100%		
	2 Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	75%		
	<b>Output:</b>			
	<i>SD yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	920		
	3 SMP yang telah dipetakan mutunya	100%		
	4 Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	80%		
	<b>Output:</b>			
	<i>SMP yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	344		
	5 SMA yang telah dipetakan mutunya	100%		
	6 Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	80%		
	<b>Output:</b>			
	<i>SMA yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	125		
	7 SMK yang telah dipetakan mutunya	90%		
	8 Presentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	70%		
	<b>Output:</b>			
	<i>SMK yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	98		
		<b>Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</b>	<b>154 sekolah</b>	<b>5.177.780.000</b>
		<b>Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013</b>	<b>595 sekolah</b>	<b>8.707.231.000</b>
	9	SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
	<b>Output:</b>			
	<i>a. SD yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	57		
	<i>b. SD yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	225		
10	SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%		
	<b>Output:</b>			
	<i>a. SMP yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	43		
	<i>b. SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	157		
11	SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2018	ANGGARAN
1	2		3	4
		<b>Output:</b>		
		a. SMA yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	30	
		b. SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013	40	
	12	SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
		<b>Output:</b>		
		a. SMK yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	28	
		b. SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013	60	
2. Terwujudnya Tata kelola LPMP Kepulauan Riau yang baik	1	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan	92%	<b>266.680.000</b>
	2	Nilai Minimal SAKIP LPMP Kepulauan Riau.	70	

Total Jumlah Anggaran Kegiatan **Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan** : Rp. 41.114.461.000,00 (empat puluh satu milyar seratus empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

### RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018 LPMP KEPULAUAN RIAU

no	Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Penyerapan Bulanan (dalam ribuan)	250	820	1,300	1,825	3,125	2,875	1,525	4,726	6,025	7,664	5,485	5,495
2	Penyerapan Kumulatif (dalam ribuan)	250	1,070	2,370	4,195	7,320	10,195	11,720	16,446	22,471	30,135	35,620	41,114
3	% Penyerapan	0.61%	2.60%	5.76%	10.20%	17.80%	24.80%	28.51%	40.00%	54.65%	73.30%	86.64%	100.00%



## EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
Dan Menengah,

**Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D**  
NIP 195905121983111001

Jakarta, Agustus 2018  
Kepala LPMP Kepulauan Riau

**Drs. Irwan Safii, M.Pd**  
NIP 196512311992031014

## PENGUKURAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2018					
		TARGET	CAPAIAN	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	<b>Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</b>	<b>1.478 Sekolah</b>	<b>1430 Sekolah</b>	<b>96,75</b>	<b>2.184.969.000</b>	<b>1.868.605.472</b>	<b>85,52</b>
	1 SD yang telah dipetakan mutunya	100%	100%	100			
	2 Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	75%	-	-			
	<b>Output:</b>						
	<i>SD yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	920	890	96,74			
	3 SMP yang telah dipetakan mutunya	100%	100%	100			
	4 Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	-	-			
	<b>Output:</b>						
	<i>SMP yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	344	331	96,22			
	5 SMA yang telah dipetakan mutunya	100%	98,40%	98,40			
	6 Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	-	-			
	<b>Output:</b>						
<i>SMA yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	125	123	98,40				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		2018					
			TARGET	CAPAIAN	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5	6	7	8
	7	SMK yang telah dipetakan mutunya	90%	100%	111,11			
	8	Presentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	70%	-	-			
		<b>Output:</b>						
		<i>SMK yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	98	89	90,82			
		<b>Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</b>	<b>154 sekolah</b>	<b>154</b>	<b>100,00</b>	<b>5.177.780.000</b>	<b>4.975.208.245</b>	<b>96,09</b>
		<b>Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013</b>	<b>595 sekolah</b>	<b>612</b>	<b>102,86</b>	<b>8.707.231.000</b>	<b>8.515.876.672</b>	<b>97,80</b>
	9	SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%					
		<b>Output:</b>						
		<i>a. SD yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	57	57	100,00			
		<i>b. SD yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	225	236	104,89	2.373.005.000	2.356.039.100	99,29
	10	SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%					
		<b>Output:</b>						
		<i>a. SMP yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	43	43	100,00			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		2018					
			TARGET	CAPAIAN	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5	6	7	8
		<i>b. SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	157	226	143,95	3.344.017.000	3.308.518.700	99,94
	11	SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%					
		<b>Output:</b>						
		<i>a. SMA yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	30	30	100,00			
		<i>b. SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	40	88	220,00	1.575.829.000	1.455.444.172	92,36
	12	SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%					
		<b>Output:</b>						
		<i>a. SMK yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	28	28	100,00			
		<i>b. SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	60	62	103,33	1.414.380.000	1.319.929.700	93,32
2. Terwujudnya Tata kelola LPMP Kepulauan Riau yang baik	1	<b>Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan</b>	92%	98,42%	106,98	266.680.000	261.935.897	98.22
	2	<b>Nilai Minimal SAKIP LPMP Kepulauan Riau.</b>	70					

## Output dan Outcome Indikator Kinerja 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	OUTPUT	OUTCOME
<b>Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</b>	<b>SD, SMP, SMA, SMK</b>	<b>1,430 Satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya</b>	1430 satuan pendidikan yang meningkat mutu pendidikannya (Meningkatnya mutu pendidikan di satuan pendidikan)
SD yang telah dipetakan mutunya	920	890 SD yang telah dipetakan mutunya	
SMP yang telah dipetakan mutunya	334	331 SMP yang telah dipetakan mutunya	
SMA yang telah dipetakan mutunya	125	123 SMA yang telah dipetakan mutunya	
SMK yang telah dipetakan mutunya	98	89 SMK yang telah dipetakan mutunya	
<b>Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP</b>	<b>SD, SMP, SMA, SMK</b>	<b>766 satuan pendidikan yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP</b>	Proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai Standar Nasional Pendidikan
<b>A. Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</b>	<b>154</b>	- 154 satuan Pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu - Berfungsinya organisasi penjaminan mutu Pendidikan di 154 satuan pendidikan	
SD yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	57	- 57 SD yang mampu menjalankan siklus penjaminan mutu - Berfungsinya organisasi penjaminan mutu Pendidikan di 56 SD	

INDIKATOR KINERJA	TARGET	OUTPUT	OUTCOME
SMP yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	43	- 43 SMP yang mampu menjalankan siklus penjaminan mutu - Berfungsinya organisasi penjaminan mutu Pendidikan di 42 SMP	-
SMA yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	30	- 30 SMA yang mampu menjalankan siklus penjaminan mutu - Berfungsinya organisasi penjaminan mutu Pendidikan di 29 SMA	-
SMK yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	28	- 28 SMK yang mampu menjalankan siklus penjaminan mutu - Berfungsinya organisasi penjaminan mutu Pendidikan di 27 SMK	-
<b>B. Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum 2013</b>	<b>595</b>	<b>612 satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013</b>	Meningkatnya Standar Kompetensi Kelulusan, Isi, dan Proses
SD yang melaksanakan Kurikulum 2013	225	236 SD yang melaksanakan Kurikulum 2013	
SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013	157	226 SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013	
SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013	40	88 SD yang melaksanakan Kurikulum 2013	
SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013	60	62 SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013	
<b>Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru</b>	<b>92%</b>	98,42% data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru	Meningkatnya akuntabilitas kinerja LPMP Kepulauan Riau
<b>Nilai Minimal SAKIP LPMP Kepulauan Riau</b>	<b>70</b>		





**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kepulauan Riau**  
Jalan Tata Bumi Km. 20 Ceruk Ijuk, Toapaya,  
Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kode Pos 28125  
Mail: [lpmp.kepri@kemdikbud.go.id](mailto:lpmp.kepri@kemdikbud.go.id)  
Website: [lpmpkepri.kemdikbud.go.id](http://lpmpkepri.kemdikbud.go.id)